LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM

PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

PEMBIMBING:

Admiral Nelson Aritonang, Ph.D

Rosilawati, S.Sos., MPS.Sp

Oleh:

AKHMAD SULTHON IMAN NAUFAL

NRP. 20.03.025

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BANDUNG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul	: LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
Nama Mahasiswa	: Akhmad Sulthon Iman Naufal
NRP	: 20.03.025
Program	: Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan

Pembimbing

(Admiral Nelson Aritonang, Ph.D)	**(Rosilawati, S.Sos, MPS.Sp)**

Mengetahui

Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Program Sarjana Terapan

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

(Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia nikmat-Nya sehingga praktikan dapat menyelesaikan laporan dengan judul "Laporan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial".

Laporan ini disusun dari hasil kegiatan praktikum laboratorium yang dimulai pada tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2023 yang berisi proses kegiatan praktikum dari tahap inisiasi sosial sampai dengan penyusunan rencana interveni sesuai dengan 5 profil program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial yaitu analis jaminan sosial, analis sumber daya bantuan sosial, analis pemberdayaan sosial, analis penataan lingkungan sosial, serta analis penanggulangan bencana.

Selesainya penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan doa berbagai pihak. Pada kesempatan ini, praktikan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Marjuki, M.Sc selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
2. Ibu Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
3. Ibu Atirista Nainggolan, MP selaku Kepala Laboratorium Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
4. Bapak Admiral Nelson Aritonang, Ph.D selaku dosen pembimbing Praktikum Laboratorium yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada praktikan
5. Ibu Rosilawati, S.Sos., MPS.Sp selaku dosen pembimbing Praktikum Laboratorium yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada praktikan
6. Para dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang telah memberikan dukungan dan ilmu bagi praktikan dan teman-teman mahasiswa Poltekesos.
7. Bapak Hendra Wardana selaku Kepala Desa Soreang yang telah menyambut praktikan dengan baik dan memberikan dukungan selama pelaksanaan praktikum laboraturium.
8. Seluruh perangkat Desa Soreangyang telah memberikan informasi serta dukungan pada praktikan.
9. Seluruh masyarakat Desa Soreang yang telah memberikan dukungan dan menerima praktikan dengan sangat baik selama praktikum

10. Orang tua praktikan yang telah memberikan doa serta dukungan baik materiil maupun non materiil kepada praktikan
11. Keluarga besar praktikan yang telah memberikan doa kepada praktikan
12. Sahabat-sahabat yang memberikan semangat serta doa kepada praktikan

Praktikan menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan laporan praktikum laboratorium kali ini. Oleh sebab itu, dimohon kepada pembaca agar dapat memberikan saran serta masukan dalam rangka adanya perbaikan guna penyusunan laporan praktikum selanjutnya.

Praktikan berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca umumnya dan bagi praktikan khususnya. Atas bantuan dan bimbingan dari segala pihak, praktikan ucapkan terimakasih.

Bandung, Mei 2023

Praktikan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR 1
BAB I 2
PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktikum 3
1.3 Waktu dan Lokasi Praktikum 4
1.4 Proses Praktikum 6
1.5 Sistematika Laporan 17
BAB II 18
PRAKTIKUM LABORATORIUM 18
2.1 Profil Analisis Jaminan Sosial 18
2.2 Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial 36
2.3 Profil Pemberdayaan Sosial 51
2.4 Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial 65
2.5 Profil Analisis Penanggulangan Bencana 78
BAB III 93
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 93
DAFTAR PUSTAKA 95
LAMPIRAN 97
Lampiran 1 : Surat Izin Praktikum 97
Lampiran 2 : Surat Izin Lokakarya 99
Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian 100
Lampiran 4 : Pedoman Observasi Lapangan 101
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara 102
Lampiran 6 : Dokumentasi Kegiatan 103

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Timeline Kegiatan Praktikum 5
Tabel 2. 1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Soreang 18
Tabel 2. 2 Bentuk Kegiatan dan Program 29
Tabel 2. 3 Rencana Anggaran Biaya 31
Tabel 2. 4 Kebutuhan Alat Pelaksanaan Program 32
Tabel 2. 5 Analisis SWOT 32
Tabel 2. 6 Jadwal dan Langkah Kegiatan 33
Tabel 2. 7 Rundown Kegiatan 35
Tabel 2. 8 Bentuk Kegiatan dan Program 44
Tabel 2. 9 Rencana Anggaran Biaya 46
Tabel 2. 10 Alat yang Dibutuhkan 47
Tabel 2. 11 Analisis SWOT 47
Tabel 2. 12 Jadwal dan Langkah Kegiatan 49
Tabel 2. 13 Rundown Kegiatan 50
Tabel 2. 14 Kelompok Usia 52
Tabel 2. 15 Bentuk Kegiatan dan Program 58
Tabel 2. 16 Rencana Anggaran Biaya 61
Tabel 2. 17 Alat Kebutuhan Program 61
Tabel 2. 18 Analisis SWOT 62
Tabel 2. 19 Jadwal dan Langkah Kegiatan 63
Tabel 2. 20 Rundown Kegiatan 64
Tabel 2. 21 Bentuk Kegiatan dan Program 72
Tabel 2. 22 Rencana Anggaran Biaya 74
Tabel 2. 23 Alat Kebutuhan Program 74
Tabel 2. 24 Analisis SWOT 75
Tabel 2. 25 Jadwal dan Langkah Kegiatan 76
Tabel 2. 26 Rundown Kegiatan 77
Tabel 2. 27 Bentuk dan Kegiatan Program 86
Tabel 2. 28 Rencana Anggaran Biaya 88
Tabel 2. 29 Alat Kebutuhan Program 89
Tabel 2. 30 Analisis SWOT 89
Tabel 2. 31 Jadwal dan Langkah Kegiatan 90
Tabel 2. 32 Rundown Kegiatan 91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pembekalan Praktikum Laboratorium.....7
Gambar 1. 2 Diskusi Bahasan Materi Tiap Profil.....8
Gambar 1. 3 Pembekalan Profil Analis Jaminan Sosial.....8
Gambar 1. 4 Pelepasan di Kantor Desa Soreang.....9
Gambar 1. 5 Inisiasi Sosial di Desa Soreang.....10
Gambar 1. 6 Inisiasi dan Wawancara Bersama PSM.....10
Gambar 1. 7 Inisiasi Sosial di Posyandu.....11
Gambar 1. 8 Pembekalan Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial.....12
Gambar 1. 9 Pertemuan dengan Kader PKK dan Kaur Pelayanan.....12
Gambar 1. 10 Pertemuan dengan Ketua Forum RW Desa Soreang.....13
Gambar 1. 11 Pembekalan Profil Analis Pemberdayaan Sosial.....13
Gambar 1. 12 Wawancara bersama Ketua Forum RW Desa Soreang.....14
Gambar 1. 13 Pembekalan Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial.....15
Gambar 1. 14 Pembekalan Profil Analis Penanggulangan Bencana.....16
Gambar 1. 15 Tahap Lokakarya Praktikum Laboratorium.....16
Gambar 2. 1 Analisis Pohon Masalah.....23
Gambar 2. 2 Skema Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan.....25
Gambar 2. 3 Analisis Pohon Masalah.....39
Gambar 2. 4 Analisis Pohon Masalah.....54
Gambar 2. 5 Analisis Pohon Masalah.....67
Gambar 2. 6 Analisis Pohon Masalah.....82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial merupakan salah satu program studi yang ada dalam Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang berdiri sejak 09 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 436/KPT/I/2018.

Profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan dihasilkan untuk memiliki keunggulan meliputi aspek kemampuan kerja, kemampuan manjerial, penguasaan pengetahuan dan tanggung jawab, yaitu:

A. Analis Jaminan Sosial
   Yaitu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji implementasi, mendisain program, mengaplikasikan sistem dan menyelesaikan masalah dalam sistem jaminan sosial dalam perlindungan sosial.
B. Analis Sumber Dana Bantuan Sosial
   Yaitu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji berbagai permasalahan, mendisain rencana pelaksanaan model, mengaplikasikan berbagai model dan menyelesaikan masalah dalam implementasi sumber dana bantuan sosial.
C. Analis Pemberdayaan Sosial
   Yaitu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji berbagai permasalahan, mendisain rencana, mengaplikasikan berbagai model dan menyelesaikan masalah dalam pemberdayaan sosial.
D. Analis Penataan Lingkungan Sosial
   Yaitu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji berbagai permasalahan, mendisain rencana, dan menyelesaikan masalah dalam penataan lingkungan sosial.
E. Analis Penanggulangan Bencana
   Yaitu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji berbagai permasalahan, mendisain rencana, dan menyelesaikan masalah dalam penanggulangan bencana

Untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, diperlukan pengetahuan, keterampilan, dan nilai pekerjaan sosial. Proses pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas (*classroom teaching*), tetapi juga melalui praktikum laboratorium (*laboratory practicum*) *indoor* dan *outdoor*. Kegiatan praktikum laboratorium menjadi wahana bagi mahasiswa

untuk mengasah keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam proses intervensi pekerjaan sosial. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas di masyarakat untuk memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat sesuai dengan profil lulusan dari program studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Sehingga diharapkan dengan adanya praktikum ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menganilisis masalah, potensi, dan sistem sumber yang terdapat dalam masyarakat sehingga dapat berlatih menerapkan peran-peran pekerja sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktikum

A. Tujuan praktikum

Praktikum laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki :

1) Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
2) Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
3) Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
4) Kemampuan untuk mempraktikan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
5) Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
   a. Pendekatan Awal
   b. Asesmen
   c. Perencanaan Intervensi

B. Manfaat praktikum

1) Bagi mahasiswa
   a. Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan

sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

b. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
c. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
d. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikan keterampilanketerampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
e. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
f. Mahasiswa memiliki keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang meliputi tahapan ;
    a) Pendekatan awal
    b) Asesmen
    c) Rencana Intervensi

2) Bagi lembaga
    a. Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Polteknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
    b. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

1.3 Waktu dan Lokasi Praktikum

Praktikum ini berlokasi di Desa Soreang adalah salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dengan luas wilayah 234,03 ha dan merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian ± 700 dpl. Jumlah Penduduk Desa Soreang per tahun 2019 adalah 19.415 jiwa dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai wiraswasta di bidang Konveksi. Wilayah Desa Soreang terdiri dari 4 Dusun, 24 RW dan 94 RT. Berdasarkan data yang dimiliki, Desa Soreang sebelumnya merupakan Gabungan 2 (dua) Desa yaitu

Desa Soreang yang berdiri sejak tahun 1874 s/d 1922 dan Desa Cibogor yang berdiri sejak Tahun 1877 s/d 1921.

Desa Soreang. merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Soreang, yang terletak di kota Kecamatan, Desa Soreang mempunyai luas wilayah seluas 243.030 ha/m2. Adapun batas-batas wilayah desa Soreang :

Sebelah Utara : Desa Pamekaran dan Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Sebelah Selatan : Desa Panyirapan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Sebelah Timur : Desa Panajung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung

Sebelah Barat : Desa Kramatmulya Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Iklim Desa Soreang, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang mayoritas lahannya adalah areal pertanian meskipun tidak sedikit industri *textile* yang ada di Desa Soreang.

Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

A. Pra Lapangan
   1) Pembekalan : 25 Januari – 3 Februari 2023
   2) Pelepasan Praktikan : 8 Februari 2023

B. Lapangan : 8 Februari - 15 April 2023

Tabel 1. 1 Timeline Kegiatan Praktikum

No	Rincian Kegiatan	Februari				Maret				April			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pembekalan Praktikum Laboratorium												
2	Pembekalan Materi Analisis Jaminan Sosial												
3	Praktik Analisis Jaminan Sosial												
4	Supervisi												
5	Penyusunan Laporan Analisis Jaminan Sosial												
6	Pembekalan Materi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial												

7	Praktik Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial													
8	Penyusunan Laporan Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial													
9	Pembekalan Materi Analisis Pemberdayaan Sosial													
10	Praktik Analisis Pemberdayaan Sosial													
11	Penyusunan Laporan Analisis Pemberdayaan Sosial													
12	Pembekalan Analisis Penata Lingkungan Sosial													
13	Praktik Analisis Penata Lingkungan Sosial													
14	Penyusunan Laporan Analisis Penata Lingkungan Sosial													
15	Pembekalan Materi Analisis Penanggulangan Bencana													
16	Praktik Analisis Penanggulangan Bencana													
17	Penyusunan Laporan Analisis Penanggulangan Bencana													

1.4 Proses Praktikum

Praktikum laboratorium dilaksanakan sekitar 10 minggu dimana 2 minggu untuk setiap profilnya. Dimulai dari profil Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penata Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Praktikum dilaksanakan di lokasi yang telah ditentukan oleh Prodi untuk masing-masing kelompok yang telah dibentuk. Praktikan melakukan tahapan inisiasi sosial sampai dengan tahap penyusunan rencana intervensi dengan teknologi yang sudah diperlajari. Adapun rincian proses praktikum adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Pra Lapangan

Kegiatan pra lapangan dilakukan sebelum melaksanakan praktikum di lapangan. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 25 Januari 2023.

1) Pembekalan Praktikum Laboratorium (25 Januari 2023)

Pada tanggal 25 Januari 2023 dilaksanakan Pembekalan Praktikum Laboratorium yang diselenggarakan di Gedung Auditorium Poltekesos Bandung dan diikuti oleh seluruh mahasiswa Poltekesos Prodi

Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Dalam pembekalan ini disampaikan dan dijelaskan mengenai Pedoman Pelaksanaan Praktikum. Dimana juga dijelaskan bahwasannya Praktikum Laboratorium ini sebagai sarana mahasiswa Poltekesos Bandung khususnya Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial untuk meningkatkan nilai pengetahuan serta keterampilan dalam praktik intervensi komunitas. Tujuan praktikum ini juga sebagai sarana implementasi nilai, pengetahuan, dan keterampilan dalam menggunakan metode dan teknik dalam proses intervensi komunitas dari tahap pendekatan, asesmen, dan perencanaan intervensi. Peserta praktikum laboratorium ini merupakan mahasiswa semester VI yang sudah memenuhi 8 mata kuliah prasyarat yaitu intervensi pekerja sosial dengan komunitas, sistem perlindungan sosial, asuransi dan jaminan sosial, praktik pekerjaan sosial dengan bencana, sistem bantuan sosial, praktik pemberdayaan organisasi dan kelembagaan sosial, modal sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial, serta praktik pekerjaan sosial dan lingkungan (*Green Social Work*). Selain itu juga dijelaskan bagaimana tahapan dari kegiatan praktikum sesuai dengan rentang waktunya.

Gambar 1. 1 Pembekalan Praktikum Laboratorium

Adapun dalam pelaksanaan Praktikum Laboratorium ini mahasiswa dibagi menjadi 12 kelompok dengan masing masing 7 atau 8 mahasiswa disetiap kelompoknya. Kelompok tersebut terbagi kedalam beberapa

desa, dan adanya kelompok ini untuk mempermudah jalannya proses praktikum juga bimbingan dari dosen pembimbing.

Gambar 1. 2 Diskusi Bahasan Materi Tiap Profil

2) Pembekalan Profil Analis Jaminan Sosial (2 Februari 2023)

Pada 2 Februari 2023 dilaksanakan pembekalan terkait dengan materi Analisis Jaminan Sosial oleh Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn, MSE, Perencana Ahli Muda Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas. Poin utama yang disampaikan yaitu Kebijakan dan Struktur Jaminan Sosial, Tantangan Program Jaminan Sosial di Indonesia di Indonesia "Pekerja Informal di Indonesia", dan Potensi Kontribusi Lulusan Jaminan Sosial.

Gambar 1. 3 Pembekalan Profil Analis Jaminan Sosial

3) Pelepasan (8 Februari 2023)

Pada Rabu, 8 Februari 2023 dilaksanakan kegiatan pelepasan Praktikum Laboratorium untuk seleuruh mahasiswa angkatan tahun 2020. Seluruh mahasiswa di setiap prodi mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut di depan gedung rektorat Poltekesos Bandung.

Gambar 1. 4 Pelepasan di Kantor Desa Soreang

B. Kegiatan Lapangan

Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 8 Februari 2023 s.d. 15 April 2023 di Desa Soreang yang berada di wilayah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Praktikum dilaksanakan dimulai dengan tahap inisiasi sosial, asesmen, dan penyusunan rencana intervensi dengan menggunakan teknologi dan metode yang sudah dipelajari sebelumnya. Kegiatan lapangan meliputi praktik terkait dengan lima profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Poltekesos Bandung meliputi Praktik Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penata Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana.

1) Praktik Analis Jaminan Sosial

Praktik Analis Jaminan Sosial dilaksanakan mulai tanggal 8 Februari 2023 s.d. 18 Februari 2023. Dimulai dengan inisiasi sosial dengan perangkat Desa Soreang. Dimana inisiasi sosial merupakan tahapan awal dalam intervensi komunitas untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, stakeholder, dan lain sebagainya. Dalam tahapan ini praktikan meminta izin sekaligus memberikan surat pengantar izin praktikum dari Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Poltekesos. Adapun yang diperoleh dari tahapan

ini adalah izin juga dukungan dari pemerintah Desa Soreang untuk melaksanakan praktikum di Desa Soreang.

Gambar 1. 5 Inisiasi Sosial di Desa Soreang

Pada tanggal 9 Februari 2023 praktikan datang menuju rumah Pekerja Sosial Masyarakat Desa Soreang yang bernama Ibu Tuting untuk melakukan inisiasi dan mengajukan beberapa pertanyaan meliputi gambaran kesejahteraan sosial di Desa Soreang.

Gambar 1. 6 Inisiasi dan Wawancara Bersama PSM

Selanjutnya, praktikan melaksanakan inisiasi sosial bersama dengan kelompok PKK dan kader Posyandu. Selain itu, hadir pula Puskesos dan tenaga kesehatan dari Puskesmas Soreang.

Gambar 1. 7 Inisiasi Sosial di Posyandu

2) Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

Kegiatan praktik analis sumber dana bantuan sosial dilaksanakan pada 22 Februari 2023 sampai 4 Maret 2023. Pada tanggal 22 Februari diselenggarakan pembekalan praktikum laboratorium profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial dengan narasumber yaitu Pak Tonton Heryanto yang merupakan Manager CSR dari PT. AAPC. Kegiatan dilaksanakan di gedung Auditorium Poltekesos bandung dan diikuti oleh seluruh mahasiswa praktikum laboratorium tahun 2023.

Adapun yang didapatkan dari pembekalan tersebut yang berkaitan dengan Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial yaitu dalam praktik pengelolaan sumber dana bantuan sosial, bukan hanya mengejar pendanaan atau sumberdana namun juga perlu mengutamakan apa itu kemitraan. Dengan kemintraan yang sudah di kapitalisasi akan mendapatkan banyak kemudahan, selain itu kemitraan juga jangan hanya dianggap sebagai sumber pendanaan saja melaikan harus dimaknai lebih luas yaitu sebagai sarana transfer pengetahuan, informasi, keterampilan, dan masih banyak lagi. Pada pembekalan antusias praktikan sangat tinggi dibuktikan dengan banyaknya mahasiswa yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

Gambar 1. 8 Pembekalan Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

Pada tanggal 17 Februari 2023 praktikan mengadakan pertemuan dengan Yeni Mulyati sebagai Kader PKK Desa Soreang. Pertemuan ini dilaksanakan untuk memulai persiapan Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, yaitu untuk membuka sudut pandang terkait Bantuan Sosial yang ada di Desa soreang.

Gambar 1. 9 Pertemuan dengan Kader PKK dan Kaur Pelayanan

Pada tanggal 23 Praktikan memulai pendalaman terkait isu-isu Dana Bantuan Sosial yang ada di Desa Soreang. Pendalaman ini dimulai dengan mengadakan pertemuan bersama Kaur Kesra dan Kaur Pelayanan Desa Soreang. Hasil Pertemuan membuka pandangan praktikan, karena pelaksanaan Dana Bantuan Sosial yang ada di lapangan begitu variatif permasalahannya.

Gambar 1. 10 Pertemuan dengan Ketua Forum RW Desa Soreang

3) Analis Pemberdayaan Sosial

Kegiatan praktik analis pemberdayaan sosial dimulai pada 08 Maret 2023 hingga 18 Maret 2023. Sebelum memulai praktik, praktikan diberi pembekalan pada tanggal 08 Maret 2023 yaitu mengenai Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial oleh Bapak Samsul Maatif selaku Project Manajer Yayasan Usaha Mulia Kabupaten Cianjur. Kegiatan Pembekalan ini berlangsung di Gedung Auditorium Poltekesos Bandung dan diikuti oleh seluruh Praktikan Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

Adapun yang didapatkan dari pembekalan tersebut yaitu mengenai bekal-bekal di dalam masyarakat seperti pendekatan pemberdayaan, tahapan dan proses pemberdayaan, penyelenggaraan pemberdayaan, permasalahan dan solusi dalam pemberdayaan, juga mengenai esensi dari pemberdayaan. Sehingga praktikan dapat berpraktik dengan mekanisme yang jelas dan memiliki tujuan.

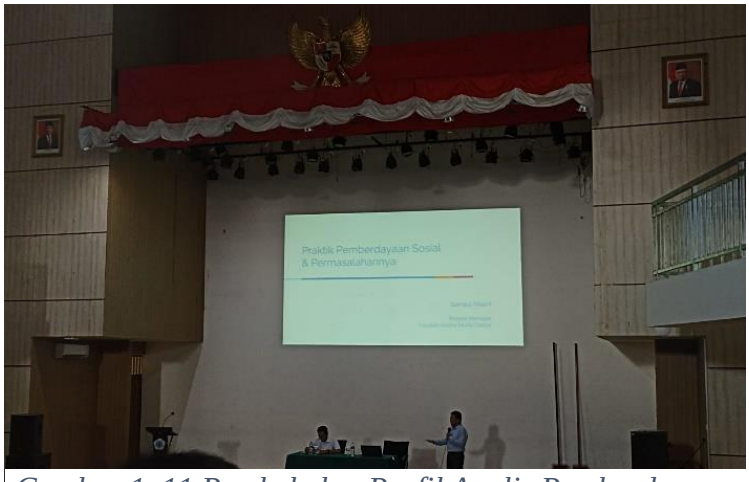

Gambar 1. 11 Pembekalan Profil Analis Pemberdayaan Sosial

Untuk memulai praktik analis pemberdayaan sosial praktikan memulai dengan mengadakan pertemuan bersama dengan perangkat desa untuk mengetahui garis garis besar perihal pemberdayaan yang ada di Desa Soreang. Kemudian untuk terkait dengan pendalaman analis pemberdayaan sosial praktikan memulai untuk melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait dengan program program pemberdayaan sosial yang ada di Desa Soreang. Yaitu meliputi wawancara dengan Ibu Tuting selaku Puskesos Desa Soreang, Bapak Agus selaku Ketua Forum RW Desa Soreang, dan beberapa narasumber lain seperti penerima manfaat dari beberapa program pemberdayaan.

4) Analis Penata Lingkungan Sosial

Gambar 1. 12 Wawancara bersama Ketua Forum RW Desa Soreang

Profil Analis Penata Lingkungan Sosial dilaksanakan mulai 22 Maret 2023 sampai dengan 01 April 2023. Kemudian pada 24 Maret 2023 diselenggarakan pembekalan mengenai profil tersebut yang disampaikan oleh Bapak Ade Reno, AKS., MSW dari Deputi 1 CEO, Islamic Relief Indonesia dan kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Auditorium Poltekesos Bandung. Kegiatan ini diikuti oleh seleuruh praktikan Praktikum Laboratorium Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Poltekesos Bandung tahun 2020.

Adapun pembekalan yang disampaikan oleh pemateri meliputi hal dasar hingga hal yang spesifik memuat penataan lingkungan sosial. Bapak Ade Reno memulai dengan pertanyaan apa itu lingkungan sosial dan menjelaskan mengenai konsep lingkungan dan lingkungan sosial yang begitu luas. Kemudian beliau menerangkan bahwasannya pekerja sosial memiliki peranan penting dalam memperhatikan aspek lingkungan yang diasosiasikan dengan berbagai istilah seperti *green social work* dan *eco social work.*

Terkait dengan permasalahan sosial ekonomi lingkungan terbai menjadi dua yaitu masalah lingkungan dan masalah sosial ekonomi yang saling berkesinambungan. Lebih jauh beliau menerangkan tahapan tahapan kerja bidang penataan lingkungan sosial yaitu identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Gambar 1. 13 Pembekalan Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial

Seperti pada profil sebelumnya, sebelum memulai wawancara atau pendalaman isu terkait dengan profil analis penataan lingkungan sosial, praktikan akan memulai dengan pertemuan bersama dengan perangkat desa untuk melihat garis garis besar yang ada di lingkungan desa terkait dengan isu lingkungan. Dengan hal tersebut praktikan akan memiliki bekal untuk pendalaman tahapan berikutnya. Kemudian untuk tahapan pendalaman isu praktikan memulai dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya seperti Bapak Agus dan Ibu Kepala Sekolah dari SD Cibiru.

5) Analis Penanggulangan Bencana

Praktik Analis Penanggunalangan Bencana dilaksanakan mulai dari 5 April 2023 sampai dengan 15 April 2023. Dan pada tanggal 5 April 2023 diselenggarakan pembekalan Profil Analis Penanggulangan Bencana oleh Bapak Robi dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB).

Pembekalan ini memberikan gambaran terkait dengan potensi kebencanaan yang ada di Indonesia. Kemudian bencana merupakan masalah bersama, perlunya kemitraan, sinergitas, dan inklusifitas untuk penanganan atau penanggulangan yang efektif. Bapak Robi menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial menjadi salah satu disiplin ilmu yang diperlukan untuk penanggulangan bencana sebagai indikator atau standar keberhasilan penangulangan bencana.

Untuk memulai wawancara atau pendalaman isu terkait dengan profil analis penataan lingkungan sosial, praktikan akan memulai dengan pertemuan bersama dengan perangkat desa untuk melihat garis garis besar yang ada di lingkungan desa terkait dengan isu bencana di Desa Soreang. Namun hasil dari pertemuan tersebut untuk Desa Soreang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir hanya 2 kali terjadi bencana yaitu banjir dan kebakaran di salah satu kawasan.

Dalam pelaksanaan praktik analis kebencanaan, praktikan akhirnya memutuskan untuk mendalami isu terkait dengan tahapan pengurangan risiko bencana atau mitigasi bencana yang masih masuk dalam tahapan kerja bidang kebencanaan dalam upaya mengurangi risiko terjadinya bencana dengan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SD Cibiru Desa Soreang.

C. Kegiatan Pasca Lapangan

Kegiatan pasca lapangan setelah kegiatan praktikum di lapangan selesai yaitu ditutup dengan tahap Lokakarya yang diselenggarakan di Aula desa Soreang. Dimana Lokakarya tersebut dihadiri oleh praktikan, pembimbing, perangkat desa, beserta tamu undangan.

Gambar 1. 14 Tahap Lokakarya Praktikum Laboratorium

1.5 Sistematika Laporan

Laporan praktikum laboratorium program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial disusun berdasarkan sistematika berikut ini :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum, serta sistematika penulisan.

II. PRAKTIKUM LABORATORIUM

Memuat tinjauan tentang laporan profil analis jaminan sosial, profil analis sumber dana bantuan sosial, profil analis pemberdayaan sosial, profil analis penataan lingkungan sosial, dan profil analis penanggulangan bencana. Setiap profil analis memuat tentang gambaran umum masalah, tinjauan konsep atau teori yang relevan dengan kasus atau masalah ksejahteraan sosial yang dipilih, asesmen, rencana intervensi yang terdiri dari latar belaknag, tujuan intervensi, bentuk kegiatan dan program, sistem partisipan, metode dan teknik yang digunakan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, jadwal dan langkah-langkah.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Memuat tentang kesimpulan yang menggambarkan tentang kesimpulan proses praktikum serta rekomendasi menggambarkan saran atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial dan politeknik kesejahteraan sosial bandung dalam meningkatkan pelaksanaan praktikum agar semakin baik untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

PRAKTIKUM LABORATORIUM

2.1 Profil Analisis Jaminan Sosial

A. Gambaran Umum Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Soreang yaitu bidang pelayanan, berikut merupakan profil masyarakat Desa Soreang berdasarkan mata pencahariannya :

Tabel 2. 1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Soreang

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan
1.	Tidak/belum bekerja	5.234	Jiwa
2.	Pensiunan	255	Jiwa
3.	Pegawai Negeri Sipil	381	Jiwa
4.	TNI/POLRI	93	Jiwa
5.	Petani	68	Jiwa
6.	Buruh	2.830	Jiwa
7.	Pegawai Swasta	1.509	Jiwa
8.	Wiraswasta	2.990	Jiwa
9.	Lainnya	10.964	Jiwa
10.	Jumlah	25.287	Jiwa

Sumber : Pemerintah Desa Soreang, 2020

Desa Soreang merupakan salah satu desa di Kabupaten Bandung yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor infomal, yaitu petani, buruh tani, pedagang, pegawai swasta, dan wiraswasta. Namun khususnya pada mata pencaharian sebagai petani hampir semua dari mereka tidak menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan karena belum ada sosialisasi, rendahnya kesadaran tentang pentingnya jaminan sosial di kemudian hari, dan ekonomi yang sulit.

Masyarakat yang bekerja di sektor informal memiliki pemahaman bahwa BPJS Ketenagakerjaan di khususkan untuk pekerja dalam suatu instansi atau pekerja formal. Jika hal ini berlanjut, pekerja sektor informal akan sangat rentan terkena resiko keberfungsian sosialnya. Maka dari itu praktikan tertarik untuk mengkaji tentang jaminan ketenagakerjaan di Desa Soreang khususnya bagi petani dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas keberlangsungan Jaminan Sosial terkhusus pada Program BPJS Ketenagakerjaan.

Pendalaman informasi terkait dengan Jaminan Sosial di Desa Soreang, praktikan melakukan inisiasi sosial sebagai permulaan. Yaitu dengan melaksanakan kunjungan ke Kantor Desa, kemudian keesokan

harinya menggali informasi terkait dengan Jaminan Sosial. Selanjutnya melakukan *transect walk* sebagai langkah untuk mengetahui kondisi lingkungan dan masyarakat.

Untuk melakukan analisis serta identifikasi masalah, praktikan menggunakan wawancara ketika mengujungi kantor Desa Soreang dan masyarakat. Adapun rincian wawancara dalam identifikasi masalah yaitu sebagai berikut.

1) Wawancara dengan Pak Rohman selaku Kaur Kesra dan Pak Iyus Selaku Kaur Pelayanan Desa Soreang pada tanggal 8 Februari 2023.
2) Wawancara dengan Ibu Tuting selaku PSM Desa Soreang pada tanggal 9 Februari 2023.
3) Wawancara dengan Ketua Forum RW Desa Soreang yaitu Bapak Agus Hilman.
4) Wawancara dengan Ketua Kelompok Wanita Tani yaitu Ibu Yayah Rokayah.

Dari hasil wawancara tersebut, didapatkan bahwa masalah terkait analis jaminan sosial adalah sebagai berikut:

1) Rendahnya kepesertaan pekerja sektor informal petani pada BPJS Ketenagakerjaan
2) Lansia Terlantar belum mendapatkan JKN-KIS PBI
3) Besarnya jumlah penyandang disabilitas yang membutuhkan jaminan sosial namun aksesibilitas dalam pelayanan masih banyak menemui kendala
4) Ketidakpatuhan Peserta BPJS Mandiri dalam pembayaran iuran
5) Jamsosmas dana sehat yang berpotensi untuk dikembangkan dalam kebermanfaatannya di masyarakat
6) Guru ngaji tidak lolos verifikasi program BPJS Ketenagakerjaan
7) Kurangnya informasi dan partisipasi BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja konveksi
8) Masih terdapat masyarakat fakir miskin yang melum menjadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK)

Adapun fokus masalah yang diambil adalah pada poin 8 yaitu Rendahnya kepesertaan Pekerja Sektor Informal Petani pada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam profil Desa Soreang mengenai mata pencaharian masyarakat, terkhusus pada petani berjumlah 68 jiwa dan adapun buruh tani masuk dalam golongan buruh secara umum. Buruh di tabel mata pencaharian masyaarakat Desa Soreang 2.830 itu meliputi buruh secara umum seperti buruh harian lepas, buruh bangunan, dan buruh tani. Dalam hal ini pekerja sektor informal di Desa Soreang cukup tinggi dari total keseluruhan 25.000 jiwa, pekerja sektor informal mencapai lebih dari 30 persennya.

Terkhusus pada pekerja informal petani dan buruh tani merupakan salah satu bagian dari pekerjaan informal. Petani dan buruh tani merupakan pekerjaan yang rentan menghadapi permasalahan dan menggantungkan kehidupan pada lahan pertanian dengan variabel yang begitu luas. Seperti hasil panen, musim, pupuk, hama, dan masih banyak lagi. Dari fakta yang ditemukan di lapangan khusus petani bisa dikatakan belum menjadi peserta dari Sistem Jaminan Sosial pada Program BPJS Ketenagakerjaan.

Kurangnya informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan merupakan penyebab rendahnya kepesertaan program tersebut. Informasi yang didapatkan masyarakat sebagian besar mencakup program BPJS Kesehatan saja, untuk BPJS Ketenagakerjaan belum ada sosialisasi atau informasi lebih lanjut terkait dengan mekanisme, kriteria, dan sifat kepesertaan. Dalam hal ini ada informasi yang kurang jelas di masyarakat bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya dikhususkan untuk pekerja informal atau yang bekerja di suatu instansi.

Hal ini yang praktikan angkat sebagai bentuk permasalahan dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Terkait dengan permasalahan tersebut Program yang sudah disusun dan dibentuk kurang optimal apabila kepesertaannya tidak mampu menjangkau lapisan masyarakat. Dan hal ini menyebabkan penyelenggaraan jaminan sosial tidak mampu meng-*cover* masyarakat utamanya pekerja informal terkhusus petani dan buruh tani di Desa Soreang.

B. Tinjauan Konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih

1) Kajian Jaminan Sosial

Cheyne, O'Brein dan Belgrave (1998:176) jaminan sosial pada dasamya adalah pelaksanaan fungsi sosial dari negara. Untuk jelasnya marl kita cermati kutipan berikut ini. Menurut mereka, apa yang kita kenaI sebagai "jaminan sosial" ini adalah: Pertama, *as a system of statefinancial support that is paid to those persons who are not provided for adequately by the market.* Kedua, *As a system of state financial support paid to those persons who are unable to secure adequately.*

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial merupakan sistem dari keuangan negara untuk membantu masyarakat yang tidak memadai dalam pasar. Dan yang kedua sebagai suatu sistem yang memberikan dukungan kepada masyarakat yang tidak dapat menjamin kecukupannya.

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga

negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Kepesertaan jaminan sosial bersifat wajib dan diselenggarakan oleh pemerintah melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 dengan berlandaskan UUD 1945 dan dalamnya menyatakan bahwa Pemerintah harus terlibat dalam menyejahterakan warga negaranya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ayat 1 menyatakan "Jaminan Sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak".

Jaminan sosial terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, serta jaminan hari tua. Sistem jaminan sosial nasional ini dilakukan berdasarkan dengan 3 asas yakni kemanusiaan (menjunjung tinggi harga diri manusia), manfaat (pemberian kebutuhan dasar hidup yang layak), serta keadilan (semua kalangan mempunyai kedudukan yang sama dalam memperoleh jaminan sosial) dan berdasarkan 9 prinsip yaitu kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Jaminan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi setiap peserta program dan anggota keluarganya, dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak. Pelaksanaan SJSN merupakan kewajiban negara, sekaligus kewajiban penduduk untuk menjadi peserta jaminan sosial. Penyelenggaraan SJSN berdasarkan mekanisme asuransi sosial dan kepesertaan yang bersifat wajib.

2) Kajian BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dimana BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan.

Jenis-jenis anggota BPJS Ketenagakerjaan terbagi menjadi 4, yaitu :

a. Jasa Konstruksi yaitu pekerja yang bekerja di sebuah penyedia layanan berupa konsultasi atas berbagai tahapan pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah konstruksi.
b. Penerima Upah (PU) yaitu pekerja yang melakukan pekerjaan kemudian mendapatkan imbalan dari pihak pemberi kerja.

Imbalan tersebut dapat berupa upah, gaji, maupun jenis imbalan yang lain.

c. Bukan Penerima Upah (BPU), yaitu orang yang memperoleh pendapatan bersumber dari bisnis yang dijalankan sendiri. Beberapa pekerjaan yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya dokter, tukang ojek, pedagang keliling, pengacara, dan lainnya.
d. Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu seorang WNI yang melakukan sebuah pekerjaan di luar negeri, baik akan, sedang, maupun sudah selesai melakukan pekerjaan tersebut.

Terdapat 4 program dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu program jaminan hari tua (JHT) yang akan diberikan ketika berusia 56 tahun berdasarkan kontribusi premi, program jaminan pensiun (JP) yang akan diberikan ketika mengalami pendiun baik itu karena cacat, usia, meninggal, maupun mutasi tetap ke luar negeri. Lalu ada program jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang diberikan dalam rangka melindungi tenaga kerja dari kemungkinan risiko pekerjaan berupa kecelakaan kerja. Kemudian ada program jaminan kematian (JKM) yang akan diberikan ketika peserta meninggal dunia dan akan diberikan kepada ahli waris.

3) Kajian Pekerja Sektor Informal

Pekerja sektor informal adalah mereka yang bekerja di sektor ekonomi yang tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan resmi, dan sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke perlindungan sosial dan hak-hak pekerja. Berikut adalah pandangan beberapa ahli tentang pekerja sektor informal:

- Martha Chen: "Pekerja sektor informal adalah mereka yang bekerja di sektor ekonomi yang tidak diatur atau kurang diatur oleh pemerintah, dan biasanya tidak memperoleh jaminan sosial atau hak-hak pekerja."
- Keith Hart: "Pekerja sektor informal adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang tidak didefinisikan oleh pemerintah, dan sering kali memiliki ketergantungan yang rendah pada pekerjaan formal atau perusahaan."
- Jan Breman: "Pekerja sektor informal adalah mereka yang bekerja di sektor ekonomi yang tidak diatur atau terlalu minim diatur oleh pemerintah, dan seringkali tidak mendapatkan akses yang memadai ke perlindungan sosial dan hak-hak pekerja."
- Renana Jhabvala: "Pekerja sektor informal adalah mereka yang bekerja di sektor ekonomi yang tidak diatur atau minim diatur,

dan biasanya memiliki tingkat pendapatan yang rendah, ketidakpastian pekerjaan, serta tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya ekonomi dan sosial."

- Françoise Carré: "Pekerja sektor informal adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yang tidak diatur atau terlalu minim diatur, dan sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya atau jaringan sosial yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang stabil."

Setiap ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang pekerja sektor informal, namun pada dasarnya mereka semua setuju bahwa pekerja sektor informal adalah mereka yang bekerja di sektor ekonomi yang tidak diatur atau minim diatur oleh pemerintah, dan biasanya tidak memiliki akses yang memadai ke perlindungan sosial dan hak-hak pekerja. Hal ini memperlihatkan bahwa penting untuk memberikan perlindungan dan hak yang memadai bagi para pekerja sektor informal agar mereka juga bisa memperoleh penghasilan yang stabil dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Pekerja sektor informal menurut UU Ketenagakerjaan merupakan orang yang bekerja tanpa relasi kerja, artinya tidak ada perjanjian yang mengatur elemenelemen kerja, upah dan kekuasaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara umum mendefinisikan sektor informal sebagai aktifitas ekonomi yang tidak terdaftar, yang tidak memiliki struktur organisasi formal. Contoh dari pekerja sektor informal yaitu petani, pedagang kaki lima, dan sebagainya.

Dalam jurnal Analisa Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sektor Formal dan Sektor Informal di Jawa Timur (2014) karya Yupi Kurniawan Sutopo dan R.R. Retno Ardianti, ekonomi sektor informal memiliki delapan ciri utama, yaitu:

a. Kegiatan usahanya tidak terorganisasi dengan baik.
b. Karena kelompok usahanya tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang berbentuk formal, biasanya kelompok usaha yang tergolong dalam sektor informal, tidak memiliki izin resmi.
c. Pola kegiatan usahanya tidak teratur dengan baik. Mulai dari lokasi hingga jam kerjanya.
d. Unit usaha yang dilakukan sering berganti dari satu sub sektor ke sub sektor lainnya.
e. Umumnya teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi masih bersifat tradisional atau sederhana.
f. Skala operasi kegiatan sektor informal tergolong kecil karena modal dan perputaran usahanya cenderung minim.

g. Tidak memerlukan pendidikan formal untuk menjalankan kegiatan usahanya karena sebagian besar pengetahuannya diperoleh dari pengalaman saat bekerja.
h. Modalnya berasal dari tabungan atau lembaga keuangan tidak resmi.

Hal ini memperlihatkan bahwa penting untuk memberikan perlindungan dan hak yang memadai bagi para pekerja sektor informal agar mereka juga bisa memperoleh penghasilan yang stabil dan meningkatkan taraf hidup mereka.

C. Asesmen

1) Identifikasi Masalah

a. Penyebab masalah

Penyebab permasalahan mengenai pekerja informal terkhusus petani yang ada yaitu belum adanya sosialisasi terkait dengan Program BPJS Ketenagakerjaan di Desa Soreang, kurangnya kesadaran pentingnya Jaminan Sosial, dan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan.

b. Dampak Masalah

Dampak masalah yang bisa terjadi yaitu memperburuk kesejahteraan keluarga apabila ada kecelakaan kerja atau kematian pada pekerja sektor infromal terkhusus petani, pada permasalahan pekerja informal. Dan adapun dampak lain yang ditimbulkan yaitu tidak adanya uang pensiun apabila masuk masa tidak produktif.

c. Fokus Masalah/masalah inti/masalah utama

Desa Soreang merupakan salah satu desa di Kabupaten Bandung yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor infomal, yaitu petani, buruh tani, pedagang, pegawai swasta, dan wiraswasta. Namun khususnya pada mata pencaharian sebagai petani hampir semua dari mereka tidak menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan karena belum ada sosialisasi, rendahnya kesadaran tentang pentingnya jaminan sosial di kemudian hari, dan ekonomi yang sulit.

Masyarakat yang bekerja di sektor informal memiliki pemahaman bahwa BPJS Ketenagakerjaan di khususkan untuk pekerja dalam suatu instansi atau pekerja formal. Jika hal ini berlanjut, pekerja sektor informal akan sangat rentan terkena resiko keberfungsian sosialnya. Tercatat sekitar 68 jiwa memiliki mata pencaharian sebagai petani, namun Ketua Forum RW Desa Soreang dan dikuatkan oleh Ketua Pengurus Kelompok Wanita Tani (KWT) dari 68 jiwa petani tidak

memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Maka dari itu praktikan tertarik untuk mengkaji tentang jaminan ketenagakerjaan di Desa Soreang khususnya bagi petani dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas keberlangsungan Jaminan Sosial terkhusus pada Program BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat pada penyebab utama yaitu belum ada sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan dan dampak utamanya akan memperburuk kesejahteraan keluarga apabila terjadi kecelakaan kerja atau kematian, dapat disimpulkan bahwa fokus masalah yang dikaji yaitu terkait dengan Rendahnya Kepesertaan Pekerja Sektor Informal Petani pada BPJS Ketenagakerjaan.

Banyak dari petani yang tidak mengetahui dan mempertimbangkan resiko sosial jangka panjang yang akan terjadi sehingga tidak ada tindakan atau langkah antisipasi. Sedangkan dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dengan adanya Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian sangatlah penting untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan apabila sudah masuk dalam masa tidak produktif, kecelakaan kerja, hingga kematian. Adapun fokus masalah ini dikaji menggunakan *tools* analisis pohon masalah.

Gambar 2. 1 Analisis Pohon Masalah

Keterangan :

Akar dalam pohon tersebut mengilustrasikan penyebab terjadinya permasalahan yang memunculkan penyebab masalah turunan. Adapun batang pohon mengilustrasikan fokus masalah yang diambil. Kemudian dampak permasalahan di representasikan dalam bentuk daun daunan dalam pohon tersebut.

Fokus masalah yang dikaji melalui *tools* tersebut yaitu Rendahnya Kepesertaan Pekerja Sektor Informal Petani pada BPJS Ketenagakerjaan. Penyebab utama masalah ini yaitu belum adanya sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Desa Soreang. Penyebab utama ini memunculkan penyebab yang lain, yaitu kurangnya kesadaran pentingnya Jaminan Sosial, dan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Dampak utama yang ditimbulkan dari hal ini adalah Dampak masalah yang bisa terjadi yaitu memperburuk kesejahteraan keluarga apabila ada kecelakaan kerja atau kematian pada pekerja sektor infromal terkhusus petani, pada permasalahan pekerja informal. Dan adapun dampak lain yang ditimbulkan yaitu tidak adanya uang pensiun apabila masuk usia tidak produktif.

2) Identifikasi Kebutuhan

Melihat pada penyebab masalah yang dikaji melalui pohon masalah, yang mana penyebab utama permasalahan yaitu belum adanya sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Desa Soreang dan kurangnya kesadaran pentingnya Jaminan Sosial, dan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Maka diperlukan penyuluhan dan penyadaran akan pentingnya menjadi bagian dari peserta BPJS Ketenagakerjaan, untuk memberikan informasi pentingnya jaminan sosial dan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri agar resiko sosial tidak akan merusak kondisi kesejahteraan. Selain itu diperlukan edukasi untuk petani agar mengetahui cara dan sistematika pendaftaraan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan lengkap dengan skema pembayaran atau iurannya.

Adapun rincian mengenai skema pembayaran BPJS Ketenagakerjaan pada kepesertaan Bukan Penerima Upah tercantum dalam *website* resmi BPJS Ketenagakerjaan. Terkhusus pada Bukan Penerima Upah yang ingin mendaftarkan untuk Jaminan Kematian besaran perhitungan iuran sebesar 6.800 rupiah. Simulasi umum besaran iuran dalam BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima upah sebagai berikut:

Program	Upah	Jumlah Iuran
JHT	—	20.000
JKK	1.000.000	10.000
JKM	—	6.800
Total		36.800
Pembayaran di muka 3 Bulan		110.000

Gambar 2. 2 Skema Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan

Sumber : Website Resmi BPJS

3) Identifikasi Potensi dan Sumber

a. Sistem Sumber Informal

Bentuk dari sistem ini yaitu keluarga, rekan, tetangga, ataupun seseorang yang mampu memberikan bantuan kepada pekerja sektor informal terkhusus petani. ”

b. Sistem Sumber Formal

Bentuk dari sistem sumber ini yaitu kelompok tani, kelompok wanita tani, dan Forum RW setempat.

c. Sistem Sumber Kemasyarakatan

Bentuk sistem sumber ini yaitu Puskesos, Dinas Sosial setempat, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Soreang.

D. Rencana Intervensi

1) Latar Belakang

Setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial, baik itu berupa jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan. Namun berdasarkan assesmen di Desa Soreang, terdapat permasalahan dimana hampir semua pekerja sektor informal terkhusus petani tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan. Padahal, mereka sebagai komponen bukan penerima upah (BPU), sebaiknya memiliki jaminan pensiun dan kematian. Hal ini disebabkan belum pernah ada sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Desa Soreang, kurangnya informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan atau Jaminan Sosial.

Mereka memliki pemahaman yang kurang tepat mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang beranggapan BPJS ini hanya untuk pekerja formal. Mereka tidak mengetahui bagaimana mekanisme serta skema BPJS Ketenagakerjaan, mereka juga tidak terlalu

mengetahui apa saja manfaat yang akan mereka dapat ketika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan posisi yang lemah secara legalitas serta tingkat produktivitas dan upah yang relatif lebih rendah, masyarakat yang bekerja di sektor informal yang dimaksud dalam masalah ini termasuk dalam kategori kelompok rentan. Mereka juga termasuk dalam golongan warga yang kesulitan mengakses jaminan sosial.

Seharusnya mereka sebagai pekerja sektor informal mengikuti program Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian namun dikarenakan ketidaktahuan mereka yang mana mereka hanya mengetahui bahwa yang wajib mengikuti hanyalah orang yang bekerja di sektor formal, maka hampir semua pekerja sektor informal terkhusus petani di Desa Soreang tidak mengikuti program jaminan pensiun dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.

2) Tujuan umum dan khusus

Adapun tujuan umum dalam rencana intervensi ini yaitu :

a. Memberikan pemahaman informasi dan pemahaman kepada pekerja sektor informal terkhusus petani yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
b. Menumbuhkan kesadaran berbagai pihak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Tujuan khusus dalam rencana intervensi ini yaitu :

a. Mengurangi resiko menurunnya tingkat kesejahteraan keluarga apabila terjadi kecelakaan kerja atau kematian.
b. Pekerja sektor informal menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

3) Bentuk Kegiatan dan Program

Nama program ini yaitu ”Penyuluhan dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal Petani”. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat khususnya petani dan fasilitasi pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Untuk sasarannya seluruh petani di Desa Soreang yang belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 2. 2 Bentuk Kegiatan dan Program

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Narasumber
1.	Penyuluhan dan diskusi mengenai jaminan sosial dan pentingnya untuk pekerja informal terkhusus petani.	Tingginya antusiasme masyarakat, dengan ditandai tingginya jumlah kehadiran.	Dinas Sosial Kabupaten.
2.	Penyuluhan dan diskusi mengenai konsep kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan skema pembayarannya.	Masyarakat mengetahui dan memahami sasaran BPJS Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung.
4.	Pendampingan pendaftaran kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan	Meningkatnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya petani Desa Soreang	Praktikan

4) Sistem Partisipan

Sistem partisipan dalam program ini yaitu

a. *Initiator System*

Dalam hal ini adalah praktikan sebagai pekerja sosial yang merupakan sesorang yang mengakui adanya masalah dan berfikir bahwa perlu adanya program untuk peningkatan kesejahteraan dari masyarakat sekitar untuk dapat membuat perubahan dan tindakan untuk pekerja infromal petani di Desa Soreang lebih baik.

b. *Change Agent*

Dalam program ini yaitu pekerja sosial, dinas sosial, dinas ketenagakerjaan, serta BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan penyuluhan. Adapun pekerja sosial dalam hal ini sebagai pemecah masalah.

c. *Client System*

Dalam hal ini *Client System* adalah Pekerja Informal terkhusus petani Desa Soreang yang tidak menjadi peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

d. *Support System*

Sistem yang mendukung program perubahan ini yaitu perangkat desa, organisasi kemasyarakatan, kelompok tani, kelompok wanita tani, PKK, dan BPJS Ketenagakerjaan.

e. *Controlling System*

Controlling System dalam program ini yaitu Kepala Desa Soreang yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap Desa Soreang terkhusus memiliki kekuasaan untuk menyetujui dan mengawasi pelaksanaan program perubahan.

f. *Implementing System*

Dalam hal ini Sistem Implementasi nya yaitu organisasi Kelompok Wanita Tani dan Kelompok Tani yang memiliki peran penting untuk mendukung pelaksanaan program karena anggota dalam kelompok tersebut adalah petani yang merupakan pekerja informal.

g. *Target System*

Sistem Target dalam program ini merupakan pekerja informal terkhusus petani yang tidak menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, yang selanjutnya akan di dorong untuk merubah pemahaman juga kesadaran akan pentingnya menjadi peserta Pogram BPJS Ketenagakerjaan.

h. *Action System*

Dalam program ini yaitu pekerja sosial selaku praktikan, kelompok tani dan kelompok wanita tani sebagai wadah dari para petani juga buruh. Kedua elemen ini diharapkan mampu melaksanakan aksi dan melakukan perubahan agar intervensi yang direncanakan terlaksana dengan baik.

5) Metode dan Teknik

Dalam pelaksanaan program ”Penyuluhan dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal Petani”, metode dalam rencana intervensi ini adalah *Community Organization and Community Development* yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian untuk membuat program kegiatan dengan sasaran pekerja informal petani dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial petani sebagai pekerja informal.

Adapun teknik yang digunakan adalah Penyuluhan dan Pendampingan dengan rincian sebagai berikut :

a. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan kegiatan penyebarluasasn informasi, edukasi, dan motivasi yang dilaksanakan oleh penyuluh kepada kelompok sasaran dengan tujuan pengubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Penyuluhan ini dilaksanakan dengan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan utamanya sasaran dapat mengerti, memahami, dan mengikuti apa yang disampaikan dengan baik atas kesadarannya sendiri. Oleh sebab

itu penyuluhan memerlukan perencanaan yang baik, terarah, serta berkesinambungan dengan rencana dan tujuan.

b. Pendampingan

Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan oleh pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan pemecahan masalah, sehingga kemandirian dapat terwujud. Pendampingan merupakan strategi yang sangat menentukan program sesuai dengan prinsip yakni membantu orang.

Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman antara pihak yang memiliki program dengan sasaran program. Strategi yang digunakan dalam hal ini yaitu kolaborasi, adapun disini pekerja sosial berkolaborasi dengan pihak penyelenggara Program BPJS Ketenagakerjaan untuk membuat sasaran memahami dan mengikuti program tersebut.

6) Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

Dalam pelaksanaan program diperlukan rencana anggaran biaya yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2. 3 Rencana Anggaran Biaya

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Administrasi				
	Proposal Kegiatan	30	Lembar	500	15.000
	Persuratan	95	Lembar	500	47.500
2.	Logistik				
	Banner 3x1	1	Buah	55.000	55.000
	ATK	1	Pack	35.000	35.000
3.	Honorarium Narasumber Kegiatan				
	Dinas Sosial Kab. Bandung	1	Orang	900.000	900.000
	BPJS Ketenagakerjaan Kab. Bandung	1	Orang	900.000	900.000
4.	Konsumsi				
	Snack Narasumber	2	Orang	10.000	970.000
	Makan Siang Narasumber	2	Orang	15.000	30.000
Jumlah					2.952.500

Adapun alat yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

Tabel 2. 4 Kebutuhan Alat Pelaksanaan Program

No	Alat	Jumlah	Satuan
1.	Sound System	1	Set
2.	LCD Proyektor	1	Set
3.	Laptop	1	Buah
4.	Kabel Terminal	1	Buah
5.	Meja	6	Buah
6.	Kursi	100	Buah
7.	ATK	1	*Pack*

7) Analisis Kelayakan Program

Untuk analisis kelayakan program diperlukan analisis SWOT sehingga dapat dijadikan tolak ukur kelayakan program ”Penyuluhan dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal Petani”.

Tabel 2. 5 Analisis SWOT

	Strength	***Weakness***
Internal / Eksternal	• Masyarakat memiliki kemauan untuk melakukan perubahan • Antusiasme terhadap kegiatan resmi • Keingintahuan masyarakat tinggi	• Pemahaman yang salah mengenai BPJS Ketenagakerjaan • Kemampuan IPTEK yang rendah mengakibatkan akses informasi sulit
Opportunity	**Strategi SO**	**Strategi WO**
• Adanya kelembagaan Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani • Dukungan dari perangkat Desa untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	• Melakukan kolaborasi serta kerjasama dengan kelembagaan dan perangkat desa	• Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai Jaminan Sosial terkhusus BPJS Ketenagakerjaan untuk kelompok Informal yaitu petani

Threats	Strategi ST	Strategi WT
• Kegiatan penyuluhan pertama BPJS Ketenagakerjaan di Desa Soreang • Jadwal pelaksanaan berbenturan dengan kegiatan di lahan pertanian	• Mencari waktu yang sesuai dengan kemungkinan kehadiran paling tinggi	• Penyelenggara menyampaikan penyuluhan dengan optimal untuk meluruskan pemahaman • Pendampingan dan fasilitasi proses pendaftaran

8) Jadwal dan Langkah-langkah

Agar kegiatan berjalan dengan sistematis dan terstruktur, maka diperlukan jadwal dan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Jadwal dan Langkah Kegiatan

No	Langkah Kegiatan	Maret			
		Minggu			
		I	II	III	IV
1.	Persiapan				
	Membentuk kepanitiaan kecil	■			
	Melakukan rapat konsep kegiatan	■			
	Menyusun proposal kegiatan dan persuratan	■	■		
	Mengurus perizinan dan menjalin kerjasama dengan narasumber		■		
	Menyiapkan alat dan perlengkapan		■		
	Penyebarluasan surat undangan		■		
	Pendamping mempelajari sistematika pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan		■		
2.	Pelaksanaan				
	Sambutan-sambutan			■	
	Penyuluhan dan diskusi mengenai jaminan sosial dan pentingnya untuk pekerja informal terkhusus petani.			■	
	Penyuluhan dan diskusi mengenai konsep kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.			■	

	Penyuluhan dan diskusi mengenai manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dan skema pembayarannya.				
	Pendampingan pendaftaran kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan				
3.	Pengakhiran				
	Evaluasi kegiatan				
	Penyusunan laporan pertanggungjawaban				
	Pembubaran panitia kecil				

Kegiatan ini terbagi dalam 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan program, dan pengakhiran dengan rincian sebagai berikut :

a. Persiapan

a) Membentuk Panitia Kecil
   Kepanitiaan ini terdiri dari pekerja sosial sebagai koordinator dan anggota lainnya diambil dari tokoh masyarakat tani yang memiliki pengetahuan dan keinginan untuk berkembang.
b) Melakukan rapat konsep kegiatan
   Untuk membahas dan menyusun mengenai konsep kegiatan dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan. Akan dilaksanakan di aula desa, dan adapun yang akan dibahas adalah menentukan tupoksi tiap bagian seperti pengisi acara, undangan, dan keseluruhan mengenai konsep kegiatan.
c) Menyusun proposal kegiatan dan persuratan
   Untuk segala hal terkait dengan administrasi seperti proposal, surat menyurat, dan perizinan lainnya.
d) Mengurus perizinan dan menjalin kerjasama dengan narasumber
   Untuk perizinan akan disusun dan didiskusikan terkait dengan lokasi pelaksanaan, waktu, dan alat alat yang diperlukan. Adapun menjalin kerjasama yang dimaksud adalah dengan menghubungi narasumber dan bekerja sama untuk menyukseskan pelaksanaan program dan membantu mewujudkan tujuan dari program.
e) Menyiapkan alat dan perlengkapan
   Hal ini adalah dengan mendiskusikan terkait keperluan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program. Diantaranya seperti dengan tempat, dekorasi, jumlah kursi, meja, penataan tempat, dan lain sebagaianya.

f) Penyebarluasan surat undangan
Menyampaikan dan mengirimkan undangan kepada yang ditujukan seperti peserta, pengisi acara, dan tamu undangan dari perangkat desa.

g) Pendamping mempelajari sistematika pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
Dalam hal ini Panitia Kecil juga memiliki peran pendampingan kepada sasaran program. Untuk hal tersebut maka pendamping haruslah mengetahui sistematika dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri agar mampu mendampingi calon peserta BPJS Ketenagakerjaan.

b. Pelaksanaan Program

Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Rundown Kegiatan

No	Waktu	Durasi	Acara	Pengisi Acara
1.	08.00-09.00	60’	Registrasi tamu	Bagian kesekretariatan
2.	09.00-09.05	5’	Pembukaan Acara	MC
3.	09.05-09.20	15’	Sambutan-sambutan	Kepala Desa atau yang mewakili
4.	09.20-09.50	30’	Penyuluhan dan diskusi mengenai jaminan sosial dan pentingnya untuk pekerja informal terkhusus petani.	Dinas Sosial Kabupaten Bandung
5.	09.50-10.30	40’	Penyuluhan dan diskusi mengenai konsep kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten
6.	10.30-11.00	30’	Penyuluhan dan diskusi mengenai manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan dan skema pembayarannya.	BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten
7.	11.00-12.00	60’	Pendampingan pendaftaran kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan	Pekerja sosial dan panitia

c. Pengakhiran
   a) Evaluasi Kegiatan
   b) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dan Pembubaran Panitia Kecil

2.2 Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

A. Gambaran Umum Masalah

Menurut Permensos No 1 Tahun 2019, bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Program program bantuan sosial baik dari pusat maupun daerah sudah di implementasikan diantaranya PKH, BPNT, BLT, KIP, dan lain sebagainya.

Dalam realisasinya masih terdapat beberapa kendala seperti penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan, pengawasan yang kurang optimal, dan masih banyak lagi. Pendalaman infromasi terkait dengan Sumber Dana Bantuan Sosial di Desa Soreang, praktikan melakukan inisiasi sosial sebagai permulaan. Yaitu dengan melaksanakan kunjungan ke Kantor Desa, kemudian dilanjut dengan menggali informasi terkait dengan pelaksanaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

Untuk melakukan analisis serta identifikasi masalah, praktikan menggunakan wawancara ketika mengujungi kantor Desa Soreang dan masyarakat. Adapun rincian wawancara dalam identifikasi masalah yaitu sebagai berikut.

1) Wawancara dengan Pak Rohman selaku Kaur Kesra dan Pak Iyus Selaku Kaur Pelayanan Desa Soreang.
2) Wawancara dengan Ibu Tuting selaku PSM Desa Soreang.
3) Wawancara dengan Ketua Forum RW Desa Soreang yaitu Bapak Agus Hilman.
4) Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Cibiru Desa Soreang

Dari hasil wawancara tersebut, didapatkan bahwa masalah terkait dengan profil Sumber Dana Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

1) Kurang Tepatnya pemanfaatan oleh Penerima Manfaat pada Program Indonesia Pintar
2) Ketidakpatuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menjalankan kewajiban sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada layanan kesehatan.
3) Rendahnya tingkat graduasi mandiri Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH)
4) Hilangnya sistem controling dalam mengontrol pemanfaatan aktivitas pemanfaatan dana bantuan PKH pendidikan pada KPM

5) Kurang optimalnya pengelolaan bantuan dari Said Naum karena kesibukan bisnis
6) Penyelenggaraan PUB dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku
7) Belum maksimalnya keswadayaan masyarakat dalam menyukseskan program bunga desa RUTILAHU
8) Rendahnya keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan bantuan sosial berbasis masyarakat pada program Bank Sampah

Adapun fokus masalah yang diambil praktikan adalah pada poin 1 yaitu Kurang Tepatnya pemanfaatan oleh Penerima Manfaat pada Program Indonesia Pintar. Dari aduan Ketua Forum RW Desa Soreang dan didukung oleh Kepala Sekolah SD Cibiru menyampaikan masih adanya pengelolaan dana yang tidak tepat pada KPM tersebut, sehingga memunculkan kemungkinan penunjang dalam melaksanakan pendidikan tidak optimal. Lebih lanjut terkait dengan KPM PIP yang tidak mengelola dan memanfaatkan dana bantuan sebagaimana mestinya. Hal ini yang praktikan angkat sebagai bentuk permasalahan dalam penyelenggaraan sumber dana bantuan sosial yang mana menyebabkan penyelenggaraan sumber dana bantuan sosial tidak berjalan sesuai dengan tujuan diadakannya program.

B. Tinjauan Konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih

1) Kajian Bantuan Sosial

Menurut UU No 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, dijelaskan bahwa bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial Penerima bansos adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Pemberian bansos bertujuan untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan risiko sosial. Berikut enam tujuan bansos:

a. Rehabilitasi Sosial, yaitu bansos yang diberikan bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
b. Perlindungan Sosial, yaitu pemberian bansos disalurkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

c. Pemberdayaan Sosial, yaitu bertujuan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
d. Jaminan Sosial, yaitu bansos sebagai jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
e. Penanggulangan Kemiskinan, bahwa bansos merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
f. Penanggulangan Bencana, yaitu bertujuan untuk penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Secara umum, bansos dibedakan menjadi tiga jenis. Yaitu bantuan sosial langsung (berupa uang diberikan secara langsung secara tunai maupun non tunai), bantuan sosial berupa barang (bantuan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, dan lain-lain) serta bantuan sosial berupa jasa (bantuan berupa jasa yang disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh bantuan berupa jasa adalah pemberian pelatihan untuk penerima bantuan dari satuan kerja).

2) Kajian Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses yang terencana dan terstruktur untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikut adalah definisi pendidikan menurut beberapa ahli:

- John Dewey: "Pendidikan adalah suatu proses yang berlangsung seumur hidup dan bukan hanya persiapan untuk hidup melainkan merupakan bagian dari hidup itu sendiri."
- Jean Piaget: "Pendidikan adalah suatu proses konstruktivis di mana murid harus membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi atas pengalaman tersebut."
- Paulo Freire: "Pendidikan adalah suatu tindakan politik yang harus dilakukan secara kritis dan reflektif, yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari dominasi dan penindasan."
- Lev Vygotsky: "Pendidikan adalah suatu proses sosial yang melibatkan interaksi antara murid dan guru serta lingkungan

sosialnya, yang memberikan kesempatan bagi murid untuk berkembang dalam konteks kebudayaannya."

- Maria Montessori: "Pendidikan adalah suatu proses yang memfasilitasi perkembangan anak secara alami, di mana anak diberi kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungannya dan belajar melalui pengalaman langsung."
- B.F. Skinner: "Pendidikan adalah suatu proses perilaku di mana perilaku yang diinginkan dapat ditingkatkan melalui penguatan dan penghapusan perilaku yang tidak diinginkan melalui hukuman."

Setiap ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang pendidikan, namun pada dasarnya mereka semua setuju bahwa pendidikan adalah suatu proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan dan mengembangkan potensi.

Pendidikan merupakan proses belajar dan mengajar yang melibatkan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut adalah beberapa tinjauan teori mengenai pendidikan:

- Behaviorisme: Teori ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Menurut teori ini, manusia belajar melalui penguatan dan hukuman. Penguatan adalah hadiah atau pengakuan positif untuk perilaku yang diinginkan, sedangkan hukuman adalah konsekuensi negatif dari perilaku yang tidak diinginkan.
- Konstruktivisme: Teori ini berfokus pada peran yang dimainkan oleh pembelajaran dalam pembentukan pemahaman dan pemikiran seseorang. Menurut teori ini, manusia membangun pemahaman mereka melalui pengalaman dan refleksi atas pengalaman tersebut.
- Kognitif: Teori ini berfokus pada cara manusia memproses informasi dan belajar. Teori kognitif menekankan bahwa belajar melibatkan proses pemrosesan informasi, dan bahwa pengetahuan dan pemahaman baru dapat dicapai melalui proses pemrosesan informasi yang terorganisir dan terstruktur.
- Humanisme: Teori ini menekankan pentingnya pengalaman individu dan dorongan internal dalam belajar. Menurut teori humanisme, pendidikan harus berfokus pada pengembangan individu secara menyeluruh, termasuk pengembangan emosi, keterampilan sosial, dan spiritual.
- Kritis: Teori ini berfokus pada kritik terhadap kekuasaan dan struktur sosial yang ada. Menurut teori ini, pendidikan harus

memberikan kesadaran kritis pada siswa dan membantu mereka memahami dan mengubah struktur sosial yang tidak adil.

- Konstruksi sosial: Teori ini menekankan pentingnya pengaruh budaya, sosial, dan historis dalam pembentukan pengetahuan dan pemahaman. Menurut teori ini, pengetahuan dan pemahaman manusia dibangun melalui pengalaman sosial dan budaya mereka.

Semua teori di atas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan seringkali digunakan dalam kombinasi untuk membentuk pendekatan pendidikan yang holistik dan terpadu.

3) Kajian Program Indonesia Pintar

Merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Tujuan dari PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin /prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal sd sampai sma/smk dan jalur non formal paket a smpai paket c dan pendidikan khusus. melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Penerima PIP di jenjang sekolah dasar (SD) mendapatkan bantuan dana sebesar Rp450.000 per tahun, jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sebesar Rp750.000 per tahun, dan jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan (SMK) sebesar Rp1.000.000 per tahun. Dan untuk mendapatkan dana tersebut, siswa penerima bantuan harus datang langsung ke bank penyalur untuk melakukan pencairan.

C. Asesmen

1) Identifikasi Masalah

a. Penyebab masalah

Penyebab masalah yang ada yaitu KPM PIP belum paham mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana, hal ini tidak sesuai dengan tujuan program dari PIP. Kemudian penyebab yang lain adalah tidak adanya pengawasan terhadap pengelolaan dana yang digunakan oleh KPM.

b. Dampak Masalah

Tujuan dari program ini untuk meringankan biaya personal peserta didik tidak tercapai. Tidak terpenuhinya kebutuhan

personal peserta didik. Serta penyalahgunaan dana bantuan sosial.

c. Fokus Masalah/masalah inti/masalah utama

Permasalahan terkait dengan sumber dana bantuan sosial di Desa Soreang yaitu salah satunya adalah terkait dengan Program Indonesia Pintar dengan penyebab utama yaitu kurang memahaminya KPM PIP tentang pengelolaan dana sehingga upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan anak memperoleh pendidikan tidak optimal. Maka dapat disimpulkan fokus masalah yang dikaji yaitu terkait dengan KPM PIP yang tidak mengelola dan memanfaatkan dana bantuan sebagaimana mestinya. Aduan dari Ketua Forum RW Desa Soreang menyampaikan masih adanya pengelolaan dana yang tidak tepat pada KPM tersebut, sehingga memunculkan kemungkinan penunjang dalam melaksanakan pendidikan tidak optimal.

Gambar 2. 3 Analisis Pohon Masalah

Keterangan

Akar dalam pohon mengilustrasikan peyebab terjadinya permasalahan yang mana penyebab utama memunculkan penyebab masalah turunan. Adapun batang pohon memberikan ilustrasi fokus masalah yang dikaji. Lalu dampak permasalahan ini direpresentasikan dalam daun yang berbentuk miring untuk mengilustrasikan tingkatan dampak permasalahan.

Berdasarkan analisis pohon masalah tersebut, fokus masalah yang dikaji yaitu Kurang Tepatnya pemanfaatan oleh Penerima Manfaat pada Program Indonesia. Penyebab utamanya KPM PIP belum paham mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana, hal ini tidak sesuai dengan tujuan program dari PIP. Kemudian penyebab yang lain adalah tidak adanya pengawasan terhadap pengelolaan dana yang digunakan oleh KPM. Kemudian dampaknya Tujuan dari program ini untuk meringankan biaya personal peserta didik tidak tercapai. Tidak terpenuhinya kebutuhan personal peserta didik.

2) Identifikasi Kebutuhan

Melihat pada penyebab masalah yang dikaji melalui pohon masalah yang mana penyebab masalah utamanya KPM PIP belum paham mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana, hal ini tidak sesuai dengan tujuan program dari PIP. Kemudian penyebab yang lain adalah tidak adanya pengawasan terhadap pengelolaan dana yang digunakan oleh KPM. Maka diperlukan program khusus terkait pengelolaan serta pemanfaatan dana KPM dengan mengatur pemanfaatan dana pendidikan hanya untuk hal penunjang kegiatan pendidikan. Selain itu diperlukan pengawasan dan monitoring sebagai upaya untuk memastikan penggunaan dana bisa dengan optimal dan sesuai dengan fungsinya. Adapun pengawasan tersebut bisa dilaksanakan oleh pihak yang berkaitan dengan KPM dan pada program ini bisa dilaksanakan oleh pihak sekolah atau sepesifiknya yaitu guru pendamping PIP atau wali kelas.

3) Identifikasi Potensi dan Sumber

a. Sistem Sumber Informal

Bentuk dari sumber informal yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah terkait dengan Kurang Tepatnya Pemanfaatan oleh Penerima Manfaat pada Program KIP yaitu nasihat dari keluarga KPM dan Tenaga Pendidik atau Guru terkait dengan pengelolaan dana bantuan PIP.

b. Sistem Sumber Formal

Bentuk dari sumber formal yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan Kurang Tepatnya pemanfaatan oleh Penerima Manfaat pada Program KIP yaitu kelompok sesama KPM yang diharapkan mampu memberikan saran dan masukan dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan PIP.

c. Sistem Sumber Kemasyarakatan

Bentuk dari sumber kemasyarakatan yang bisa dimanfaat dalam upaya mengatasi permaslaahan Kurang Tepatnya

Pemanfaatan oleh Penerima Manfaat pada PIP yaitu Instansi Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

D. Rencana Intervensi

1) Latar Belakang

Berdasarkan hasil asesmen di Desa Soreang dan aduan dari Ketua Forum RW Desa Soreang bahwasannya masih ada KPM PIP yang tidak memanfaatkan dana bantuan PIP dengan semestinya. Penyebab utamanya adalah belum paham mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana, hal ini tidak sesuai dengan tujuan program dari PIP. Kemudian penyebab yang lain adalah tidak adanya pengawasan terhadap pengelolaan dana yang digunakan oleh KPM.

Maka dari itu dibutuhkan program untuk memberikan penguatan pemahaman dalam pengelolaan dana KPM PIP yang dilakukan dengan memanfaatkan dana dengan semestinya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Program ini akan dilakukan dengan memanfaatkan sistem sumber baik informal, formal, dan sistem sumber kemasyarakatan. Dengan kegiatan yang berupa penyuluhan pengelolaan dan pemanfaatan dana PIP sesuai dengan tujuan dari bantuan sosial tersebut.

2) Tujuan Umum dan Khusus

Adapun tujuan umum dari rencana program adalah :

Memberikan pemahaman kepada KPM PIP terkait dengan pengelolaan dana PIP dan pemanfaatan dana dengan semestinya.

Adapun tujuan khusus dari rencana program adalah :

a. Dapat mengubah perilaku KPM yang semula kurang optimal dalam mengelola dan memanfaatkan dana menjadi sesuai dengan tujuan dari program.
b. Kegiatan pendidikan untuk KPM berlangsung optimal dengan penggunaan dana yang tepat.

3) Bentuk Kegiatan dan Program

Nama program ini yaitu ”Penyuluhan dan Pendampingan Pemanfaatan Dana Bantuan PIP”. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk edukasi kepada KPM PIP. Untuk sasarannya yaitu penerima PIP dan Keluarga penerima di SD Cibiru Desa Soreang. Adapun bentuk kegiatan dari program akan dijelaskan dalam bentul tabel seperti berikut.

Tabel 2. 8 Bentuk Kegiatan dan Program

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Narasumber
1.	Penyuluhan mengenai Program Indonesia Pintar dan peraturan pengelolaan dana PIP	KPM PIP memahami konsep PIP dan mampu mengelola sesuai dengan ketentuan	Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
2.	Pendampingan sebagai bentuk *controlling* pelaksanaan pengelolaan dana PIP	KPM PIP mampu mengelola dan memanfaatkan dana bantuan PIP dengan semestinya	Pihak Sekolah

Adapun kegiatan dalam program ini diantaranya :

a. Penyuluhan

Dalam kegiatan ini KPM akan diberikan edukasi dan penjelasan terkait dengan peraturan penggunaan dana PIP sesuai dengan tujuannya. Adapun hal ini disampaikan dengan tujuan memberikan informasi terkait dengan tanggungjawab yang harus dilaksanakan ketika menerima bantuan dari program tersebut.

b. Pendampingan

Dalam kegiatan ini selanjutnya akan ada pendampingan dari guru atau wali kelas untuk meninjau pelaksanaan pengelolaan dana PIP. Adapun hal ini berfungsi sebagai *controlling* penggunaan dana bantuan tersebut agar sesuai dengan tujuan pemberian dana.

4) Sistem Partisipan

Sistem partisipan dalam progam ini yaitu :

a. *Initiator System*

Initiator system yaitu praktikan sebagai calon pekerja sosial yang dalam hal ini merupakan orang pertama yang mengakui keberadaan masalah dan merasa bahwa perlu ada program yang mampu mengubah perilaku KPM PIP dalam pengelolaan dana bantuan serta meningkatkan kemapuannya dalam mengelola pemanfaatan dana bantuan PIP.

b. *Change Agent*
   Dalam program ini yaitu praktikan sebagai pekerja sosial, Dinas Sosial Kabupaten bandung, Dinas Pendidikan, Pihak Sekolah, dan Keluarga dari penerima PIP yang akan melakukan perubahan agar sesuai dengan tujuan dari program.
c. *Client System*
   Yang menjadi penerima utama dalam program ini adalah KPM PIP yang sudah terpilih sebagai penerima bantuan program.
d. *Support System*
   Yang mendukung upaya perubahan ini yaitu keluarga dari penerima dan pihak sekolah dari penerima. *Support System* ini akan mendukung kegiatan dengan memberikan dukungan berupa moril dan *controlling.*
e. *Controlling Sustem*
   Sistem kontrol dalam kegiatan ini yaitu Kepala Desa Soreang dan Kepala Sekolah yang memiliki kekuasaan untuk memberikan persetujuan dan memerintahkan pelaksanaan atas perubahan yang diusulkan.
f. *Implementing System*
   Implementasi pelaksanaan program dilaksanakan oleh KPM PIP yang memiliki kewajiban untuk mengelola pemanfaatan program dan melaksanakan perubahan berkelanjutan.
g. *Target System*
   Dalam program ini yaitu KPM PIP yang terdaftar dalam PIP SD Cibiru. Selanjutnya perlu dirubah pemahaman dan pengelolaan pemanfaatan dana bantuan dengan sebagaimana mestinya untuk peningkatan manfaat dari PIP.
h. *Action System*
   Dalam program ini *Action System* yaitu praktikan, pihak sekolah sebagai pendukung, dan Dinas Pendidikan sebagai unsur pendukung tambahan.

5) Metode dan Teknik

Dalam pelaksanaan program ”Penyuluhan dan Pendampingan Pemanfaatan Dana Bantuan PIP” akan menggunakan metode *Community Organization* dan *Community Development* (COCD) yang merupakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengembangan yang bertujuan meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan sosial PIP.

Adapun teknik yang digunakan yaitu :

a. Persuasi
   Yaitu teknik untuk meyakinkan orang lain agar menerima dan mendukung pandangan terhadap suatu isu. Hal ini dilakukan

agar KPM dapat menyadari bagaimana penyimpangan pengelolaan dana tersebut sehingga dapat menuju perubahan perilaku.

b. Penyuluhan

Yaitu penyebarluasan informasi, edukasi, juga motivasi yang diberikan oleh penyuluh kepada kelompok sasaran dengan tujuan pengubahan perilaku yang lebih baik.

c. Capacity Building

Yaitu proses untuk meningkatkan kemampuan mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini kemampuan untuk pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan PIP.

6) Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

Untuk memperikaran jumlah anggaran yang diperlukan, maka diperlukan suatu rencana anggaran biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2. 9 Rencana Anggaran Biaya

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Administrasi				
	Proposal Kegiatan	30	Lembar	500	15.000
	Persuratan	25	Lembar	500	12.500
2.	Logistik				
	Banner 3x1	1	Buah	55.000	55.000
	ATK	1	Pack	35.000	35.000
3.	Honorarium Narasumber Kegiatan				
	Dinas Pendidikan Kab. Bandung	1	Orang	900.000	900.000
4.	Konsumsi				
	Snack Narasumber	1	Orang	10.000	10.000
	Snack Undangan	25	Orang	10.000	250.000
	Makan Siang Narasumber	1	Orang	15.000	10.000
Jumlah					1.287.500

Adapun alat-alat yang dibutuhkan dalam program ini yaitu :

Tabel 2. 10 Alat yang Dibutuhkan

No	Alat	Jumlah	Satuan
1.	Sound System	1	Set
2.	LCD Proyektor	1	Set
3.	Laptop	1	Buah
4.	Kabel Terminal	1	Buah
5.	Meja	6	Buah
6.	Kursi	20	Buah
7.	ATK	1	Pack

7) Analisis Kelayakan Program

Untuk menganalisis kelayakan program, maka diperlukan analisis SWOT sehingga dapat dijadikan tolak ukur kelayakan program terkait dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman dalam program ”Penyuluhan dan Pendampingan Pemanfaatan Dana Bantuan PIP”.

Tabel 2. 11 Analisis SWOT

	Strength	***Weakness***
Internal / Eksternal	• Isu menjadi perhatian di kalangan keluarga KPM • Pihak Sekolah peduli akan perubahan perilaku mengenai KPM PIP • Dukungan dari Ketua Forum RW Desa Soreang	• Pengetahuan akan pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan yang kurang tepat
Opportunity	**Strategi SO**	**Strategi WO**
• Adanya pihak yang bisa memberikan penyuluhan dan pendampingan dalam	• Melakukan kolaborasi serta kerjasama dengan pihak sekolah	• Memberikan dan menguatkan kesadaran untuk mengelola dan memanfaatan dana bantuan

pengelolaan dan pemanfaatan dana yaitu pihak sekolah • Pihak sekolah yang terbuka dan menyadari adanya pengelolaan dan pemanfaatan dana yang kurang tepat		PIP dengan semestinya
Threats	**Strategi ST**	**Strategi WT**
• Pelaksanaan monitoring yang cukup sulit	• Memberikan suatu buku catatan pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan sebagai salah satu upaya monitoring	• Meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran KPM untuk mengelola dan memanfaatkan dana bantuan PIP dengan semestinya

Program ini layak dilaksanakan karena terdapat strategi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah dan mengatasi hambatan. Dalam tabel *Strenght* (S) lebih besar daripada *Weakness* (W) dan *Opportunity* (O) lebih besar daripada *Threats* (T).

8) Jadwal dan Langkah-langkah

Agar kegiatan berjalan dengan sistemati dan teratur, maka diperlukan penyusunan jadwal dan langkah-langkah kegiatan. Dalam susunan jadwal dan langkah langkah ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta menjadi perkiraan waktu dari setiap rangkaian kegiatan. Adapun jadwal dan langkah-langkah ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 12 Jadwal dan Langkah Kegiatan

No	Langkah Kegiatan	Maret			
		Minggu			
		I	II	III	IV
1.	Persiapan				
	Membentuk kepanitiaan kecil	■			
	Melakukan rapat konsep kegiatan	■			
	Menyusun proposal kegiatan dan persuratan	■	■		
	Mengurus perizinan dan menjalin kerjasama dengan narasumber		■		
	Menyiapkan alat dan perlengkapan		■		
	Penyebarluasan surat undangan		■		
	Panitia mempelajari sistematika monitoring dari Program Indonesia Pintar		■		
2.	Pelaksanaan				
	Penyuluhan mengenai Program Indonesia Pintar			■	
	Penyuluhan mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan dana bantuan PIP			■	
	Sesi tanya jawab			■	
	Pembagian buku rekap pemanfaatan dana			■	
3.	Pengakhiran				
	Evaluasi kegiatan				■
	Penyusunan laporan pertanggungjawaban				■
	Pembubaran panitia kecil				■

Pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan program, dan pengakhiran dengan rincian sebagai berikut :

a. Persiapan

Dalam proses periapan terdiri dari pembentukan panitia kecil sebagai penyelenggara program, adapun pekerja sosial sebagai koordinator dan anggotanya adalah pihak sekolah. Kemudian melakukan rapat, menyusun proposal, perizinan, penyebarluasan surat, menyiapkan perlengkapan, dan panitia me-*review* kembali peraturan atau undang-undang dari pelaksanaan PIP.

b. Pelaksanaan

Kegiatan dalam program ini rencananya akan dilaksanakan awal bulan yang bertempat di Gedung Aula SD Cibiru Desa Soreang.

Tabel 2. 13 Rundown Kegiatan

No	Waktu	Durasi	Acara	Pengisi Acara
1.	08.00-09.00	60’	Registrasi tamu	Bagian kesekretariatan
2.	09.00-09.05	5’	Pembukaan Acara	MC
3.	09.05-09.20	15’	Sambutan-sambutan	Kepala Sekolah atau yang mewakili
4.	09.20-09.50	30’	Penyuluhan mengenai Program Indonesia Pintar	Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
5.	09.50-10.30	40’	Penyuluhan mengenai Pengelolaan dan Pemanfaatan dana bantuan PIP	
6.	10.30-10.50	20’	Sesi Tanya Jawab	
7.	10.50-11.00	10’	Pembagian buku rekap pemanfaatan dana	Pekerja sosial dan panitia
8.	11.00-11.05	5’	Penutupan	

c. Pengakhiran

a) Monitoring dan Evaluasi

Dilaksanakan melalui rapat untuk mengetahui apakah program terlaksana sesuai dengan tujuan atau tidak.

b) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Setelah rangkaikan program, maka perlu dibuat laporan pertanggungjawaban program sebagai syarat tertib administrasi dan pertanggungjawaban kepada pihak sekolah dan desa.

c) Pembubaran Panitia

Dengan berakhirnya tahapan pengakhiran maka panitia akan dibubarkan.

2.3 Profil Pemberdayaan Sosial

A. Gambaran Masalah

Pendalaman informasi terkait dengan Pemberdayaan Sosial di Desa Soreang, praktikan melakukan inisiasi sosial sebagai permulaan. Yaitu dengan melaksanakan kunjungan ke Kantor Desa, dilanjutkan dengan menggali informasi terkait dengan Pemberdayaan Sosial. Selanjutnya melakukan *transect walk* sebagai langkah untuk mengetahui kondisi lingkungan dan masyarakat.

Untuk melakukan analisis serta identifikasi masalah, praktikan menggunakan wawancara ketika mengujungi kantor Desa Soreang dan masyarakat. Adapun rincian wawancara dalam identifikasi masalah yaitu sebagai berikut.

1) Wawancara dengan Pak Rohman selaku Kaur Kesra dan Pak Iyus Selaku Kaur Pelayanan Desa Soreang.
2) Wawancara dengan Ibu Tuting selaku PSM Desa Soreang.
3) Wawancara dengan Ketua Forum RW Desa Soreang yaitu Bapak Agus Hilman.

Dari hasil wawancara tersebut, didapatkan bahwa masalah terkait dengan profil Pemberdayaan Sosial adalah sebagai berikut :

1) Kurang Optimalnya Program Bina Keluarga Lansia karena Rendahnya SDM dalam Kepengurusan
2) Kegiatan budidaya maggot belum melibatkan warga dengan kriteria PPKS secara luas.
3) Kegiatan budidaya tanaman hidroponik yang belum dapat direalisasikan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT)
4) Belum adanya manajemen usaha yang baik dalam program usaha PEKA
5) Kondisi kegiatan usaha mikro dari perempuan penerima Program Keluarga Harapan yang belum berkembang dengan optimal
6) Rendahnya minat remaja dalam kepengurusan kader Posyandu Remaja
7) Belum optimalnya Manajemen usaha pada program pemberdayaan Ex WTS di Desa Soreang
8) Pengelolaan Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan yang Belum Optimal.

Adapun fokus masalah yang diambil adalah pada poin 1 yaitu Kurang Optimalnya Program Bina Keluarga Lansia karena Rendahnya SDM dalam Kepengurusan. Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar

mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan".

Tabel 2. 14 Kelompok Usia

No	Kelompok Usia	Jumlah
1.	Usia 0-18 Tahun	5.814 orang
2.	Usia 18-56	17.610 orang
3.	Usia 56 Tahun Ke-atas	1.863 orang
Total		**25.287 Orang**

Sumber : Pemerintah Desa Soreang, 2020

Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan yang telah dicapai Indonesia selama ini memebrikan dampak yang positif dengan meningkatnya kualistas kesehatan dan keadaan sosial masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya usia harapan hidup sehingga penduduk lansia di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Salah satu program yang dikembangkan oleh BKKBN di Lingkungan masyarakat adalah kelompok Bina Keluarga Lansia atau BKL yang sangat bermanfaat bagi keluarga yang memiliki lansia, sehingga keluarga tetap mengembangkan potensi yang dimiliki. BKL merupakan wadah bagi para lansia agar tetap sehat, aktif, produktif, dan mandiri dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kelompok.

Hasil yang didapatkan dari wawancara keberadaan BKL sebagai wadah bagi para lansia agar tetap sehat, aktif, produktif, dan mandiri dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kelompok tidak berjalan dengan semestinya. Pengurus Kelompok BKL berjumlah terbatas dan memiliki kemampuan yang kurang memadai, adapun yang memiliki kompetensi mengenai program BKL mempunyai kesibukannya sendiri, begitu yang disampaikan oleh Ibu Tuting selaku PSM Desa Soreang.

B. Tinjauan Konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial

1) Kajian Pemberdayaan Sosial

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan adalah "upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan". Selain itu pemberdayaan masyarakat juga pada dasarnya sebagai berikut:

a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan atau dikesampingkan.
b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Menurut Oos M. Anwas (2013:49), pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.35 Selanjutnya menurut Oos M. Anwas (2013:49), pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (output) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut. Keberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan kemampuan individu berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Tingkat partisipasi ini meliputi partisipasi secara fisik, mental, dan juga manfaat yang diperoleh oleh individu yang bersangkutan.

Lebih lanjut Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan bahwa 5 prisip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

a. Pemberdayaan masyarakat memerlukan *break even* dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainya.
b. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
c. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsure yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan fisik.
d. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan yang baik berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainya.
e. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan Pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

2) Kajian Bina Keluarga Lansia

Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah wadah kelompok masyarakat yang terdiri dari keluarga Lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku, dan keterampilan keluarga Lansia dan Pralansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan Lansia dan Pralansia. Keluarga Lansia adalah keluarga yang memiliki salah satu anggota keluarganya telah lanjut usia atau keluarga yang terdiri dari suami istri yang telah lanjut usia atau suami istri yang telah lanjut usia beserta keluarganya. Sasaran BKL meliputi keluarga Lansia dan Lansia dengan wilayah sasaran tingkat dusun dan/atau rukun warga.

Kegiatan BKL terdiri atas kegiatan utama dan pengembangan, yang di jelaskan sebagai berikut:

a. Kegiatan utama antara lain:
    a) Penyuluhan, meliputi materi pembangunan Keluarga Lansia Tangguh dan materi kelanjutusiaan sesuai dengan budaya kearifan lokal.
    b) Kunjungan rumah, merupakan pembimbingan langsung kepada Keluarga Lansia, khususnya yang tidak hadir dalam pertemuan penyuluhan selama 2 (dua) kali berturut-turut.

c) Pendampingan, merupakan kegiatan pendampingan bagi Lansia yang memiliki gangguan dan atau permasalahan yang berkaitan dengan 7 (tujuh) dimensi Lansia Tangguh dan atau pendampingan perawatan jangka panjang bagi Lansia yang memiliki gangguan status fungsional fisik, mental dan kognitif yang cenderung berkurang dengan bertambahnya usia.
d) Rujukan merupakan kegiatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi anggota BKL.
e) Pencatatan dan pelaporan

b. Kegiatan pengembangan meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penerapan 7 (tujuh) dimensi Lansia Tangguh, paling sedikit berupa:
a) Menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan fisik antara lain olahraga, penyediaan makanan tambahan;
b) Kegiatan sosial kemasyarakatan, bina lingkungan dan kegiatan keagamaan;
c) Kegiatan peningkatan pendapatan usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, usaha peningkatan pendapatan keluarga, dan koperasi;
d) Penguatan kemitraan.

C. Asesmen

1) Identifikasi Masalah

a. Penyebab Masalah

Penyebab masalah yaitu rendahnya kualitas SDM pengurus dari Kelompok Bina Keluarga Lansia pada permasalahan Kurang Optimalnya Program Bina Keluarga Lansia karena Rendahnya SDM dalam Kepengurusan. Permasalahan lainnya yaitu kurang inisiatif desa dalam upaya membuat program pemberdayaan keluarga lansia dalam beberapa tahun terakhir. Adapun penyebab yang lain adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bina Keluarga Lansia.

b. Dampak Masalah

Dampak masalah yang ditimbulkan yaitu tujuan adanya Kelompok Bina Keluarga Lansia tidak tercapai. Adapun dampak lainnya adalah program dari Kelompok BKL tidak optimal.

c. Fokus Masalah

Fokus masalah setelah mendapatkan informasi dan mempertimbangkan penyebab utama dari permasalahan yaitu Rendahnya Kualitas SDM pengurus dari Kelompok Bina Keluarga Lansia. Maka penetapan prioritas utama masalah yang ada yaitu Kurang Optimalnya Program Bina Keluarga Lansia karena Rendahnya SDM dalam Kepengurusan.

Gambar 2. 4 Analisis Pohon Masalah

Keterangan :

Akar dalam pohon mengilustrasikan peyebab terjadinya permasalahan yang mana penyebab utama memunculkan penyebab masalah turunan. Adapun batang pohon memberikan ilustrasi fokus masalah yang dikaji. Lalu dampak permasalahan ini direpresentasikan dalam daun yang berbentuk miring untuk mengilustrasikan tingkatan dampak permasalahan.

Berdasarkan pohon masalah tersebut, yang menjadi fokus masalah yaitu Kurang Optimalnya Program Bina Keluarga Lansia karena Rendahnya SDM dalam Kepengurusan. Penyebab utama dalam masalah ini yaitu rendahnya kualitas SDM pengurus dari Kelompok Bina Keluarga Lansia. Penyebab lainnya yaitu kurang inisiatif desa dalam upaya membuat program pemberdayaan keluarga lansia dalam beberapa tahun terakhir, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bina Keluarga Lansia.

2) Identifikasi Kebutuhan

Melihat pada penyebab masalah melalui pohon masalah yang mana penyebab utama masalah ini adalah rendahnya kualitas SDM pengurus dari Kelompok Bina Keluarga Lansia. Penyebab lainnya yaitu kurang inisiatif desa dalam upaya membuat program pemberdayaan keluarga lansia dalam beberapa tahun terakhir, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan Bina Keluarga Lansia. Maka diperlukan suatu program guna meningkatnya kualitas SDM pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia.

Adapun nantinya peningkatan kualitas SDM pengurus akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari SDM tersebut. Penilaian kapasitas menjadi landasan utama kegiatan apa yang akan digunakan dalam peningkatan kapasitas. Maka penilaian kapasitas menjadi dasar utama untuk peningkatan kapasitas atau kualitas SDM pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia.

3) Identifikasi Potensi dan Sumber

a. Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal yang dapat digunakan dalam upaya pemecahan masalah yaitu adanya keinginan dan antusiasme masyarakat Desa Soreang.

b. Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal yang dapat digunakan dalam upaya pemecahan masalah yaitu Pemerintah Desa Soreang.

c. Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sumber kemasyarakatan yang digunakan dalam upaya pemecahan masalah yaitu BKKBN.

D. Rencana Intervensi

1) Latar Belakang

Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat menjadi BKL adalah wadah kelompok masyarakat yang terdiri dari keluarga lansia dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku, serta keterampilan lansia dan pralansia untuk meningkatkan kualitas hidup.

Di Desa Soreang keberadaan BKL merupakan suatu hal yang diperlukan mengingat cakupan desa yang begitu luas dan berpenduduk lebih dari 19.000 jiwa tentunya akan sangat riskan apabila tidak memiliki wadah yang cukup baik untuk kelompok keluarga lansia. Di Desa Soreang memiliki Kelompok BKL, namun memiliki permasalahan yaitu Kurang Optimalnya Program Bina Keluarga Lansia karena Rendahnya SDM dalam Kepengurusan. Permasalahan ini diketahui berasal dari beberapa kegiatan BKL yang terkesan seadanya dan jauh dari kegiatan BKL semestinya

yang mengacu pada panduan program BKL dari BKKBN. Hal ini diketahui karena SDM pengurus BKL yang kurang mumpuni menjalankan roda kepengurusan kelompok BKL.

Maka dari itu diperlukan adanya program yang mampu meningkatkan kapasitas pengurus dari kelompok BKL dengan memanfaatkan *tools* penilaian kapasitas yang diharapkan mampu mengukur kapasitas dari kepengurusan kelompok BKL dan memiliki output rencana tindak lanjut dari hasil penilaian kapasitas tersebut. Dengan rangkaian kegiatan berupa penilaian kapasitas dan dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas kepada pengurus kelompok BKL diharapkan mampu memberikan dampak yang baik serta mampu mengatasi permasalahan dari Kurang Optimalnya Program BKL karena Rendahnya SDM dalam Kepengurusan.

2) Tujuan

Adapun tujuan umum dari rencana program yaitu Optimalnya Program Bina Keluarga Lansia dan Meningkatnya SDM dalam Kepengurusan Kelompok BKL

Adapun tujuan khusus dari program yaitu :

a. Meningkatkan SDM Kelompok BKL
b. Optimalisasi Program Bina Keluarga Lansia

3) Bentuk Kegiatan dan Program

Nama program ini adalah “Peka Kelompok Bina Keluarga Lansia”. Kegiatan akan dilaksanakan dalam bentuk mengukur dan meninjau kapasitas dari Kelompok BKL dan dilanjutkan dengan memberikan tindak lanjut terkait dengan hasil dari Penilaian Kapsitas Kelompok BKL. Untuk sasaran dari program adalah pengurus kelompok BKL yang ada di Desa Soreang.

Tabel 2. 15 Bentuk Kegiatan dan Program

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Narasumber
1.	Penyuluhan mengenai konsep Program Bina Keluarga Lansia	Mengetahui dan memahami konsep dari Program Bina Keluarga Lansia	BKKBN
2.	Penilaian Kapasitas Kelompok BKL	Mengetahui hasil pengukuran kapasitas dari Kelompok BKL	Pekerja Sosial
3.	Tindak Lanjut dari Hasil Penilaian Kapasitas dengan kegiatan *Focus Group Discussion*	Mampu meningkatkan kapasitas kelompok dengan FGD bersama dengan Kelompok BKL yang aktif	Kelompok BKL

4) Sistem Partisipan

Sistem Prtisipan yang terlibat dalam program ini yaitu :

a. *Initiator System*

Initiator system dalam program ini adalah praktikan sebagai pekerja sosial yang menyadari adanya masalah dan merasa perlu sebuah program yang dapat mengubah pemahaman Kelompok BKL dalam meningkatkan kapasitas dan membuat program yang optimal untuk keberlanjutan dari BKL.

b. *Change Agent*

Change agent dalam program ini yaitu pekerja sosial dan kelompok Bina Keluarga Lansia yang akan melakukan perubahan agar sesuai dengan tujuan dari program.

c. *Client System*

Yang menjadi klien dalam program ini adalah pengurus Kelompok BKL.

d. *Support System*

Sistem pendukung upaya perubahan ini adalah Pemerintah Desa Soreang yang akan memebrikan dukungan kegiatan dengan memberikan sumbangsih berupa moril maupun materiil.

e. *Controlling System*

Controllig system dalam kegiatan ini yaitu Kepala Desa Soreang yang memiliki kekuasaan dan otoritas untuk menyetujui dan memerintahkan pelaksanaan atas program dan rencana perubahan yang diusulkan tersebut.

f. *Implementing System*

Dalam hal ini *Implementing system* yaitu pengurus kelompok Bina Keluarga Lansia yang memiliki tugas mengelola pelaksanaan atas perubahan secara berkelanjutan.

g. *Target System*

Sistem target dalam program ini yaitu pengurus kelompok BKL. Dan selanjutnya yang perlu diberikan perubahan adalah pemahaman pengelolaan organisasi atau kelompok agar mampu memberikan dan menciptakan kegiatan mengacu pada tujuan program Bina Keluarga Lansia.

h. *Action System*

Action system dalam program ini yaitu pekerja sosial selaku praktikan dan pengurus kelompok BKL selaku kelompok yang berupaya meningkatkan kapasitas dari pengurus kelompok BKL Desa Soreang.

5) Metode dan Teknik

Dalam pelaksanaan Program "Peka Kelompok Bina Keluarga Lansia", metode yang akan digunakan adalah *Community Organization* dan *Community Development* yang merupakan perencanaan, pengorganisasian, serta pengembangan aktivitas dengan tujuan utamanya meningkatkan kemampuan organisasi agar lebih baik.

Teknik yang digunakan yaitu :

a. Penyuluhan

Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalanagan masayarakat agar mereka tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatanm atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya (Subejo, 2010).

Penyuluhan yaitu merupakan penyebarluasan informasi, edukasi, serta motivasi, yang disampaikan oleh penyuluh keapda kelompok sasaran dengan tujuan pengubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Penyuluhan dilakukakn dengan menyebarluasakan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik.

b. Penilaian Kapasitas

Yaitu merupakan proses mengukur dan menilai kemampuan organisasi atau kelompok dengan tujuan mengetahui kemampuan dan mendapatkan rencana tindak lanjut dari penilaian kapasitas organisasi atau kelompok.

c. *Capacity Building* melalui *Focus Group Discussion*

Merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah dengan melaksanakan FGD bersama kelompok yang dinilai lebih baik guna mendapatkan *insight* untuk perubahan dan mampu mengoptimalkan pengurus kelompok BKL.

6) Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

Untuk memperkirakan jumlah anggaran yang nantinya dibutuhkan, maka diperlukan suatu rencana anggaran biaya yang nantinya akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun perkiraan Rencana Anggaran Biaya Program "Peka Kelompok Bina Keluarga Lansia" akan dijabarkan dalam bentuk tabel dibawah ini. Adapun untuk rincian anggaran biaya ini adalah gambaran kasar dan bisa berubah untuk penyesuaian keadaan di lapangan.

Tabel 2. 16 Rencana Anggaran Biaya

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Administrasi				
	Proposal Kegiatan	30	Lembar	500	15.000
	Persuratan	50	Lembar	500	25.000
2.	Logistik				
	Banner 3x1	1	Buah	55.000	55.000
	ATK	1	Pack	35.000	35.000
3.	Honorarium Narasumber Kegiatan				
	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	Orang	900.000	900.000
4.	Konsumsi				
	Snack Narasumber	1	Orang	10.000	10.000
	Snack Undangan	50	Orang	10.000	500.000
	Makan Siang Narasumber	1	Orang	15.000	30.000
Jumlah					1.570.000

Adapun alat-alat yang dibutuhkan dalam program ini yaitu :

Tabel 2. 17 Alat Kebutuhan Program

No	Alat	Jumlah	Satuan
1.	Sound System	1	Set
2.	LCD Proyektor	1	Set
3.	Laptop	1	Buah
4.	Kabel Terminal	1	Buah
5.	Meja	6	Buah
6.	Kursi	50	Buah
7.	ATK	1	Pack

7) Analisis Kelayakan Program

Untuk menganalisis kelayakan program, maka diperlukan analisis SWOT sehingga dapat dijadikan tolak ukur kelayakan program terkait dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman dalam program ”Peka Kelompok Bina Keluarga Lansia”.

Tabel 2. 18 Analisis SWOT

	Strength	***Weakness***
Internal / Eksternal	• Isu menjadi perhatian di kalangan masyarakat • Pihak Pemerintah Desa peduli akan keberlanjutan Kelompok BKL • Antusiasme Kelompok Bina Keluarga Lansia	• Kapasitas Pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia Rendah • Program dan Kegiatan Kelompok BKL tidak optimal
Opportunity	**Strategi SO**	**Strategi WO**
• Adanya pedoman dan panduan Bina Keluarga Lansia Integrasi sebagai rujukan • Adanya penyuluh yang bersedia memberikan penyuluhan terkait dengan optimalisasi Kelompok BKL	• Melakukan kolaborasi serta kerjasama dengan Kelompok BKL Desa lain	• Memberikan dan menguatkan kapasitas dari pengurus Kelompok BKL Desa Soreang
Threats	**Strategi ST**	**Strategi WT**
• Pengurus Kelompok BKL yang berkapasitas tidak banyak	• Memberikan strategi pengorganiasaian dan peningkatan kapasitas tiap pengurus Kelompok BKL	• Meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kapasitas pengurus Kelompok BKL

Program ini layak dilaksanakan karena terdapat strategi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah dan mengatasi hambatan. Dalam tabel *Strenght* (S) lebih besar daripada *Weakness* (W) dan *Opportunity* (O) lebih besar daripada *Threats* (T).

8) Jadwal dan Langkah-langkah

Agar kegiatan berjalan dengan sistemati dan teratur, maka diperlukan penyusunan jadwal dan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2. 19 Jadwal dan Langkah Kegiatan

No	Langkah Kegiatan	Maret			
		Minggu			
		I	II	III	IV
1.	Persiapan				
	Membentuk kepanitiaan kecil	■			
	Melakukan rapat konsep kegiatan	■			
	Menyusun proposal kegiatan dan persuratan	■	■		
	Mengurus perizinan dan menjalin kerjasama dengan narasumber		■		
	Menyiapkan alat dan perlengkapan		■		
	Penyebarluasan surat undangan		■		
2.	Pelaksanaan				
	Penyuluhan mengenai konsep Kelompok BKL			■	
	Penilaian Kapasitas Pengurus Kelompok BKL			■	
	Focus Group Discussion			■	
3.	Pengakhiran				
	Evaluasi kegiatan				■
	Penyusunan laporan pertanggungjawaban				■
	Pembubaran panitia kecil				■

Pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan program, dan pengakhiran dengan rincian sebagai berikut :

a. Persiapan

Dalam proses periapan terdiri dari pembentukan panitia kecil sebagai penyelenggara program, adapun pekerja sosial sebagai koordinator dan anggotanya adalah pengurus Kelompok BKL. Kemudian melakukan rapat, menyusun proposal, perizinan, penyebarluasan surat, menyiapkan perlengkapan.

b. Pelaksanaan

Kegiatan dalam program ini rencananya akan dilaksanakan awal bulan yang bertempat di Gedung Aula Kantor Desa Soreang.

Tabel 2. 20 Rundown Kegiatan

No	Waktu	Durasi	Acara	Pengisi Acara
1.	08.00-09.00	60’	Registrasi tamu	Bagian kesekretariatan
2.	09.00-09.05	5’	Pembukaan Acara	MC
3.	09.05-09.20	15’	Sambutan-sambutan	Kepala Desa atau yang mewakili
4.	09.20-10.20	60’	Penyuluhan dan tanya jawab mengenai konsep Kelompok BKL	BKKBN Kab. Bandung
5.	10.20-11.20	60’	Penilaian Kapasitas Organisasi	Pekerja Sosial
6.	11.20-12.00	40’	FGD bersama dengan Pengurus Kelompok BKL Desa lain	Pekerja Sosial
7.	12.00-12.15	15’	Penutupan	Pekerja sosial dan panitia

c. Pengakhiran

a) Monitoring dan Evaluasi

Dilaksanakan melalui rapat untuk mengetahui apakah program terlaksana sesuai dengan tujuan atau tidak.

b) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Setelah rangkaikan program, maka perlu dibuat laporan pertanggungjawaban program sebagai syarat tertib administrasi dan pertanggungjawaban desa.

c) Pembubaran Panitia

Dengan berakhirnya tahapan pengakhiran maka panitia akan dibubarkan.

2.4 Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

A. Gambaran Masalah

Penataan sosial merupakan aspek penting yang mendukung dalam lingkungan sosial. Penataan sosial berfungsi sebagai pengatur ketertiban hidup dalam kehidupan masyarakat sehari- hari yang dapat mempersatukan sekumpulan individu. Penataan sosial dapat terwujud dalam aturan-aturan yang dijadikan pedoman bersama dalam mewujudkan kerja sama dan interaksi sosial sehari-hari antar anggota masyarakat di lingkungan sosial terkait. Dalam hal ini, setiap orang harus jelas kedudukannya dan peranan- peranan yang harus dilakukan, serta memahami apa yang harus diberikan, kemudian apa yang dapat diharapkan dari pihak lainnya dalam suatu lingkungan sosial.

Pendalaman informasi terkait dengan Penataan Lingkungan Sosial di Desa Soreang, praktikan melakukan inisiasi sosial sebagai permulaan. Yaitu dengan melaksanakan kunjungan ke Kantor Desa, dilanjutkan dengan menggali informasi terkait dengan Penataan Lingkungan Sosial. Selanjutnya melakukan *transect walk* sebagai langkah untuk mengetahui kondisi lingkungan dan masyarakat.

Untuk melakukan analisis serta identifikasi masalah, praktikan menggunakan wawancara ketika mengujungi kantor Desa Soreang dan masyarakat. Adapun rincian wawancara dalam identifikasi masalah yaitu sebagai berikut.

1) Wawancara dengan Pak Rohman selaku Kaur Kesra dan Pak Iyus Selaku Kaur Pelayanan Desa Soreang.
2) Wawancara dengan Ibu Tuting selaku PSM Desa Soreang.
3) Wawancara dengan Ketua Forum RW Desa Soreang yaitu Bapak Agus Hilman.
4) Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Cibiru

Dari hasil wawancara tersebut, didapatkan bahwa masalah terkait dengan profil Penataan Lingkungan Sosial adalah sebagai berikut :

1) Implementasi yang kurang optimal mengenai Perilaku Hidup Sehat di Lingkungan sekolah
2) Rendahnya partispasi masyararakat dalam budidaya atau penanaman TOGA di pekarangan rumah
3) Pemeliharaan dan pengelolaan jaringan irigasi yang kurang baik di Desa Soreang
4) Tidak adanya tim ahli dalam pengelolaan Program Green School di SD Cibiru
5) Pelaksanaan Program Lubang Cerdas Organik (LCO) sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Organik yang Belum Optimal
6) Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) yang belum optimal dalam meningkatkan fungsi keluarga.

7) Belum optimalnya peran sistem sumber terkait keberadaan lansia dimensia di RW 15
8) Jalan umum di Desa Soreang digunakan sebagai aktivitas bermain anak

Adapun fokus masalah yang diambil praktikan adalah pada poin 1 yaitu Implementasi yang kurang optimal mengenai Perilaku Hidup Sehat di Lingkungan sekolah. Fokus masalah ini berasal dari informasi yang di dapat yang bersinggungan dengan program Kota Tanpa Kumuh yang di Kabupaten Soreang di sinergikan dengan program Sabilulungan Raksa Desa Kabupaten Bandung. Adapun dalam kelanjutan program untuk Desa Soreang mengadopsi program dalam bentuk Rutilahu, Pengelolaan Sampah, dan tindakan pencegahan yaitu PHBS di lingkungan masyarakat.

B. Tinjauan Konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial

1) Kajian Penataan Lingkungan

Penataan lingkungan adalah suatu upaya untuk mengorganisir dan mengelola lingkungan dengan cara yang baik dan berkelanjutan. Berikut adalah pandangan beberapa ahli tentang penataan lingkungan:

- William McDonough: "Penataan lingkungan harus didasarkan pada prinsip 'desain benar-benar berkelanjutan' yang mempertimbangkan kebutuhan manusia dan planet ini secara bersamaan, serta mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan."
- Jan Gehl: "Penataan lingkungan harus mengutamakan manusia dengan menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, serta mengurangi penggunaan mobil dan meningkatkan penggunaan kendaraan non-motor."
- Jane Jacobs: "Penataan lingkungan harus didasarkan pada prinsip keberagaman dan kehidupan kota yang aktif, dengan mengembangkan ruang publik yang ramah manusia dan mengurangi kepadatan."
- David Harvey: "Penataan lingkungan harus melihat lingkungan sebagai sesuatu yang bersifat politik dan ekonomi, serta memperhatikan hubungan antara ruang, kekuasaan, dan kapital."
- Richard Register: "Penataan lingkungan harus dilakukan dengan mengintegrasikan unsur-unsur lingkungan yang berbeda secara holistik, termasuk elemen alam, budaya, dan sosial."
- Janine Benyus: "Penataan lingkungan harus didasarkan pada prinsip-prinsip alam yang terinspirasi dari cara alam melakukan

tata ruang dan ekosistemnya, sehingga manusia bisa belajar dari alam untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan."

Setiap ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang penataan lingkungan, namun pada dasarnya mereka semua setuju bahwa penataan lingkungan harus didasarkan pada prinsip-prinsip berkelanjutan dan manusia harus mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan.

Penataan lingkungan merupakan sebuah kegiatan menata kawasan tertentu agar dapat bermanfaat secara optimal berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah. Sebuah kawasan tertentu akan terlihat sebagai kawasan tersebut apabila kondisi lingkunganya ditata dan dipelihara sesuai dengan peran dan fungsi kawasan tersebut. Misalnya sebuah lingkungan perumahan akan dikatakan lingkungan perumahan apabila lingkungan tersebut ditata rapi,bersih, dan tertib sehingga akan melahirkan lingkungan perumahan yang baik dan sesuai fungsinya.

2) Kajian Kota Tanpa Kumuh

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang mana pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu dengan peningkatan permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru dan kehidupan yang berkelanjutan. Sehingga salah satu upaya untuk mewujudkan sasaran dari RPJMN tahun 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kolaborasi melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Di mana pelaku utama penanganan permukiman kumuh adalah pemerintah daerah dengan merevitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam mewujudkan permukiman layak huni.

Pengentasan permukiman kumuh ini terdiri dari aspek pembangunan infrastruktur dan pendampingan sosial ekonomi untuk kehidupan masyarakat yang berkelanjutan yang berada di kawasan kumuh. Program KOTAKU dengan Gerakan 100-0-100 yang berarti 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.

3) Kajian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

PHBS merupakan kependekan dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur – jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup bersih dan sehat.

PHBS adalah sebuah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari – hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat.

Terdapat langkah – langkah berupa edukasi melalui pendekatan pemuka atau pimpinan masyarakat, pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar; terutama pada tingkatan rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat.

Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu – individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari – hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan.

Tatanan PHBS melibatkan beberapa elemen yang merupakan bagian dari tempat beraktivitas dalam kehidupan sehari – hari. Berikut ini 5 tatanan PHBS yang dapat menjadi simpul – simpul untuk memulai proses penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih sehat :

- PHBS di Rumah tangga
- PHBS di Sekolah
- PHBS di Tempat kerja
- PHBS di Sarana kesehatan
- PHBS di Tempat umum

C. Asesmen

1) Identifikasi Masalah

a. Penyebab Masalah

Penyebab masalah dari hasil asesmen yaitu kurangnya pemahaman siswa dan masyarakat lingkungan sekolah mengenai PHBS, hal ini ditandai seperti toilet siswa yang kurang bersih, banyaknya pedagang kaki lima di lingkungan SD, dan pengelolaan sampah yang kurang efektif. Adapun penyebab lainnya yaitu kurang terjalinnya kerjasama SD Cibiru dengan Bank Sampah RW 10, SD Cibiru memiliki kegiatan kerjasama dengan Bank Sampah RW 10 yaitu setiap seminggu sekali mengirimkan sampah yang bisa di daur ulang kepada Bank Sampah, namun hal ini berlanjut dan sering mengalami kendala.

b. Dampak Masalah

Dampak masalah dari hasil asesmen yaitu lingkungan yang kotor dan tidak sehat di lingkungan sekolah. Hal ini nampak dari pengelolaan sampah yang tidak baik dan kotornya beberapa sudut sekolah seperti toilet. Adapun dampak yang lainnya yaitu terhambatnya proses integrasi dan kerjasama antara SD Cibiru dan Bank Sampah RW 10.

c. Fokus Masalah

Setelah mendapatkan informasi dari beberapa pihak dengan mempertimbangkan penyebab dan dampak dari permasalahan, maka praktikan menetapkan bahwa prioritas masalah yang ada yaitu Implementasi yang kurang optimal mengenai Perilaku Hidup Sehat di Lingkungan sekolah. Selanjutnya fokus masalah ini dikaji melalui analisis pohon masalah.

Gambar 2. 5 Analisis Pohon Masalah

Keterangan :

Akar dalam pohon mengilustrasikan penyebab terjadinya permasalahan yangmana penyebab utama memunculkan penyebab masalah turunan. Batang pohon mengilustrasikan fokus masalah yang dikaji. Lalu dampak permasalahan ini direpresentasikan dalam daun yang berbentuk miring untuk mengilustrasikan tingkatan dampak permasalahan dari yang terendah sampai yang tertinggi.

Berdasarkan pohon masalah tersebut, fokus masalah yang dikai yaitu Implementasi yang kurang optimal mengenai Perilaku Hidup Sehat dan Bersih di linkungan sekolah. Penyebab dari permasalahan ini yaitu kurangnya pemahaman siswa dan masyarakat lingkungan sekolah mengenai PHBS. Dan dampak yang muncul yaitu yaitu lingkungan yang kotor dan tidak sehat di lingkungan sekolah.

2) Identifikasi Kebutuhan

Melihat penyebab masalah yang dikaji melalui pohon masalah, yang mana penyebab masalah ini yaitu kurangnya pemahaman siswa dan masyarakat lingkungan sekolah mengenai PHBS dan kurang terjalinnya kerjasama SD Cibiru dengan Bank Sampah RW 10. Maka diperlukan adanya penguatan berupa kegiatan penyuluhan terkait dengan PHBS di lingkungan sekolah dan penyuluhan terkait dengan pengelolaan sampah yang diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara SD Cibiru dengan Bank Sampah RW 10.

3) Identifikasi Potensi dan Sumber

a. Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu dukungan dari Inisiator Bank Sampah RW 10 yang mampu memberikan edukasi dan pengetahuan terkait dengan pengelolaan sampah.

b. Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah yaitu Pengurus dari Bank Sampah RW 10 Desa Soreang.

c. Sistem Sumber Kemasyarakatan

SIstem sumber kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah yaitu Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

D. Rencana Intervensi

1) Latar Belakang

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak**.** Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda). Adapun dalam kelanjutan program untuk Desa Soreang mengadopsi program dalam bentuk Rutilahu, Pengelolaan Sampah, dan tindakan pencegahan yaitu PHBS di lingkungan masyarakat.

Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan hal yang mendasar dari upaya untuk menularkan pengalaman perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat dengan jalur komunikasi sebagai media berbagi indormasi. PHBS merupakan sebuah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari – hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat.

Tujuan utama dari gerakan PHBS adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu – individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari – hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan.

Kaitannya dengan penerapan PHBS di masyarakat Desa Soreang spesifik pada lingkup sekolah terdapat indikasi kurang optimalnya implementasi PHBS di lingkungan sekolah, hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Cibiru. Adapun beberapa indikator yang terlihat diantaranya toilet siswa yang kurang bersih, jajanan yang bervariatif yang tidak sehat, dan terhambatnya kerjasama dengan Bank Sampah RW 10. Terkait dengan apa yang disampaikan Kepala Sekolah SD Cibiru bisa disimpulkan ada suatu permasalahan mengenai penataan lingkungan sosial kurang optimalnya Perilaku Hidup Sehat di Lingkungan sekolah.

Maka dari itu diperlukan sebuah program untuk optimalisasi PHBS di lingkungan Sekolah dengan menguatkan kembali penanaman PHBS untuk meningkatkan kualitas perilaku hidup bersih dan sehat dengan memanfaatkan sumber sumber yang ada.

2) Tujuan

Adapun tujuan umum dari program yaitu :

Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat yang mampu meningkatkan proses belajar mengajar para siswa.

Adapun tujuan khusus dari program yaitu :

a. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat para siswa dan masyarakat lingkungan sekolah
b. Meningkatnya kesadaran siswa dan masyarakat lingkungan sekolah terkait dengan urgensi tindakan pencegahan lingkungan kumuh melalui PHBS
c. Menguatkan sinergitas sekolah dengan Bank Sampah RW 10

3) Bentuk Kegiatan dan Program

Nama program ini yaitu "Optimalisasi PHBS di Lingkungan Sekolah Dasar Cibiru". Program ini dilakukan dengan penguatan melalui penyuluhan mengenai konsep PHBS dan meningkatkan sinergi dengan pihak Bank Sampah untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai pengelolaan sampah. Adapun bentuk kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2. 21 Bentuk Kegiatan dan Program

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Narasumber
1.	Penyuluhan mengenai PHBS di Lingkungan Sekolah	Mengetahui, memahami, serta mampu menerapkan PHBS di lingkungan sekolah	Dinas Kesehatan/ Puskesmas
2.	Penyuluhan mengenai Bank Sampah beserta sistem pengelolaan Sampah RW 10	Terjalinnya sinergitas dari SD Cibiru dengan Bank Sampah RW 10	Initiator Bank Sampah (Bapak Agus)

4) Sistem Partisipan

Sistem Prtisipan yang terlibat dalam program ini yaitu :

a. *Initiator System*

Initiator system dalam program ini adalah praktikan sebagai pekerja sosial yang menyadari adanya masalah dan merasa perlu

sebuah program yang dapat meningkatkan pemahaman serta mengimplementasikan PHBS.

b. *Change Agent*

Change agent dalam program ini yaitu pekerja sosial dan SD Cibiru yang akan melakukan perubahan agar sesuai dengan tujuan dari program.

c. *Client System*

Yang menjadi klien dalam program ini adalah para siswa dan masyarakat lingkungan SD Cibiru.

d. *Support System*

Sistem pendukung upaya perubahan ini adalah Pengurus Bank Sampah RW 10 yang akan memebrikan dukungan kegiatan dengan memberikan sumbangsih berupa moril maupun materiil.

e. *Controlling System*

Controllig system dalam kegiatan ini yaitu Kepala Desa Soreang yang memiliki kekuasaan dan otoritas untuk menyetujui dan memerintahkan pelaksanaan atas program dan rencana perubahan yang diusulkan tersebut.

f. *Implementing System*

Dalam hal ini *Implementing system* yaitu seluruh bagian dari warga SD Cibiru yang memiliki tugas mengelola pelaksanaan atas perubahan secara berkelanjutan.

g. *Target System*

Sistem target dalam program ini yaitu warga SD Cibiru. Dan selanjutnya yang perlu diberikan perubahan adalah pemahaman dan peningkatkan implementasi dari PHBS.

h. *Action System*

Action system dalam program ini yaitu pekerja sosial selaku praktikan dan warga SD Cibiru selaku bagian yang berupaya meningkatkan implementasi PHBS di lingkungan sekolah.

5) Metode dan Teknik

Dalam pelaksanaan program yaitu "Optimalisasi PHBS di Lingkungan Sekolah Dasar Cibiru" metode yng akan digunakan adalah COCD. Pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankan pada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat. PBB (1955) mendefinisikan "Pengembangan masyarakat sebagai suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menumbuhkan prakarsa masyarakat itu sendiri". Teknik yang digunakan yaitu teknik penyuluhan mengenai PHBS dan Pengelolaan Sampah.

6) Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan
Untuk memperkirakan jumlah anggaran yang nantinya dibutuhkan, maka diperlukan suatu rencana anggaran biaya yang nantinya akan digunakan dala pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2. 22 Rencana Anggaran Biaya

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Administrasi				
	Proposal Kegiatan	30	Lembar	500	15.000
	Persuratan	95	Lembar	500	47.500
2.	Logistik				
	Banner 3x1	1	Buah	55.000	55.000
	ATK	1	Pack	35.000	35.000
3.	Honorarium Narasumber Kegiatan				
	Puskesmas Soreang	1	Orang	900.000	900.000
	Bapak Agus	1	Orang	900.000	900.000
4.	Konsumsi				
	Snack Narasumber	2	Orang	10.000	20.000
	Makan Siang Narasumber	2	Orang	15.000	30.000
Jumlah					2.002.500

Adapun alat-alat yang dibutuhkan dalam program ini yaitu :

Tabel 2. 23 Alat Kebutuhan Program

No	Alat	Jumlah	Satuan
1.	Sound System	1	Set
2.	LCD Proyektor	1	Set
3.	Laptop	1	Buah
4.	Kabel Terminal	1	Buah
5.	Meja	6	Buah
6.	Kursi	100	Buah
7.	ATK	1	Pack

7) Uji Kelayakan

Untuk menganalisis kelayakan program, maka diperlukan analisis SWOT sehingga dapat dijadikan tolak ukur kelayakan program terkait dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman dalam program "Optimalisasi PHBS di Lingkungan Sekolah Dasar Cibiru".

Tabel 2. 24 Analisis SWOT

	Strength	***Weakness***
Internal / Eksternal	• Isu menjadi perhatian di SD Cibiru • Pihak Sekolah peduli akan perubahan perilaku mengenai PHBS • Dukungan dari Inisiator Bank Sampah RW 10 Desa Soreang	• Rendahnya implementasi PHBS di lingkungan sekolah
Opportunity	**Strategi SO**	**Strategi WO**
• Adanya pihak yang bisa memberikan penyuluhan mengenai PHBS dan Pengelolaan Sampah untuk mendukung PHBS • Pihak sekolah yang terbuka menyadari perlunya program	• Melakukan kolaborasi serta kerjasama dengan pihak sekolah dan pengurus Bank Sampah RW 10	• Memberikan dan menguatkan kesadaran untuk meningkatkan implementasi PHBS di lingkungan sekolah
Threats	**Strategi ST**	**Strategi WT**
• Keberlanjutan kerjasama SD Cibiru dan Bank Sampah sulit dilanjutkan	• Memberikan program terstruktur seperti pemilahan sampah dini dan penyaluran yang berkelanjutan	• Meningkatkan pengetahuan pemilahan sampah pada siswa untuk memudahkan penyaluran sampah daur ulang

Program ini layak dilaksanakan karena terdapat strategi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah dan mengatasi hambatan. Dalam tabel *Strenght* (S) lebih besar daripada *Weakness* (W) dan *Opportunity* (O) lebih besar daripada *Threats* (T).

8) Jadwal dan Langkah-langkah

Agar kegiatan berjalan dengan sistemati dan teratur, maka diperlukan penyusunan jadwal dan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2. 25 Jadwal dan Langkah Kegiatan

No	Langkah Kegiatan	Maret			
		Minggu			
		I	II	III	IV
1.	Persiapan				
	Membentuk kepanitiaan kecil	■			
	Melakukan rapat konsep kegiatan	■			
	Menyusun proposal kegiatan dan persuratan	■	■		
	Mengurus perizinan dan menjalin kerjasama dengan narasumber		■		
	Menyiapkan alat dan perlengkapan		■		
	Penyebarluasan surat undangan		■		
2.	Pelaksanaan				
	Penyuluhan mengenai PHBS di Lingkungan Sekolah			■	
	Penyuluhan mengenai Bank Sampah beserta sistem pengelolaan Sampah RW 10			■	
3.	Pengakhiran				
	Evaluasi kegiatan				■
	Penyusunan laporan pertanggungjawaban				■
	Pembubaran panitia kecil				■

Pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan program, dan pengakhiran dengan rincian sebagai berikut :

a. Persiapan

Dalam proses periapan terdiri dari pembentukan panitia kecil sebagai penyelenggara program, adapun pekerja sosial sebagai koordinator dan anggotanya adalah pihak sekolah. Kemudian melakukan rapat, menyusun proposal, perizinan, penyebarluasan surat, dan menyiapkan perlengkapan.

b. Pelaksanaan

Kegiatan dalam program ini rencananya akan dilaksanakan awal bulan yang bertempat di Gedung Aula SD Cibiru Desa Soreang.

Tabel 2. 26 Rundown Kegiatan

No	Waktu	Durasi	Acara	Pengisi Acara
1.	08.00-09.00	60’	Registrasi tamu	Bagian kesekretariatan
2.	09.00-09.05	5’	Pembukaan Acara	MC
3.	09.05-09.20	15’	Sambutan-sambutan	Kepala Sekolah atau yang mewakili
4.	09.20-09.50	30’	Penyuluhan mengenai PHBS di Lingkungan Sekolah	Puskesmas
5.	09.50-10.30	40’	Penyuluhan mengenai Bank Sampah beserta sistem pengelolaan Sampah RW 10	Bapak Agus Hilman
6.	10.30-10.35	5’	Penutupan	Panitia

c. Pengakhiran

a) Monitoring dan Evaluasi

Dilaksanakan melalui rapat untuk mengetahui apakah program terlaksana sesuai dengan tujuan atau tidak.

b) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Setelah rangkaikan program, maka perlu dibuat laporan pertanggungjawaban program sebagai syarat tertib administrasi dan pertanggungjawaban kepada pihak sekolah dan desa.

c) Pembubaran Panitia

Dengan berakhirnya tahapan pengakhiran maka panitia akan dibubarkan.

2.5 Profil Analisis Penanggulangan Bencana

A. Gambaran Masalah

Menurut BNPB, Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di wilayah Indonesia. Bencana yang disebabkan oleh faktor hidrometeorologi ini selalu meningkat setiap tahunnya. Meskipun terkadang tidak menimbulkan banyak korban jiwa, bencana ini tetap saja merusak infrastruktur dan mengganggu stablitas perekonomian masyarakat secara signifikan.

Untuk melakukan analisis serta identifikasi masalah, praktikan menggunakan wawancara ketika mengujungi kantor Desa Soreang dan masyarakat. Adapun rincian wawancara dalam identifikasi masalah yaitu sebagai berikut.

1) Wawancara dengan Pak Rohman selaku Kaur Kesra dan Pak Iyus Selaku Kaur Pelayanan Desa Soreang.
2) Wawancara dengan Ibu Tuting selaku PSM Desa Soreang.
3) Wawancara dengan Ketua Forum RW Desa Soreang yaitu Bapak Agus Hilman.
4) Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Cibiru Desa Soreang.

Dari hasil wawancara tersebut, didapatkan bahwa masalah terkait analis penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1) Perlunya Sosialisasi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di SD Cibiru
2) Kurangnya Kesiapsiagaan SD Cibiru terhadap Risiko Bencana Gempa Bumi
3) Tingginya risiko kerentanan bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi ancaman bencana
4) Belum diterapkannya program Desa Siaga Bencana di Desa Soreang
5) Belum diterapkannya mitigasi bencana banjir di RW 2, 3, 4, 7
6) Belum ada manajemen penanggulangan bencana banjir di RW
7) Adanya resiko/rentan terjadinya bencana kebakaran di 7 RW/Kampung padat penduduk.

Adapun fokus masalah yang diambil adalah pada poin 1 yaitu Perlunya Sosialisasi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di SD Cibiru. Desa Soreang dalam 2 tahun terakhir sempat terkena bencana banjir 2 kali dan 2 kali terdapat bencana kebakaran. Spesifik pada bencana banjir, Desa Soreang memiliki potensi yang besar terkena banjir pada musim penghujan.

B. Tinjauan Konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial

1) Kajian Bencana

Bencana adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan merusak, yang dapat menimbulkan kerusakan pada manusia, lingkungan, dan ekonomi. Berikut adalah pandangan beberapa ahli tentang bencana:

- Ian Davis: "Bencana adalah sebuah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu masyarakat dan dapat mengakibatkan kerusakan yang signifikan pada sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan."
- Susan Cutter: "Bencana adalah hasil dari interaksi antara kejadian alam atau manusia yang merusak dan rentan masyarakat atau sistem lingkungan."
- Gilbert White: "Bencana adalah sebuah proses sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta bagaimana masyarakat merespons dan mengurangi risiko bencana."
- Henry Quarantelli: "Bencana adalah sebuah peristiwa yang dianggap sebagai bencana oleh masyarakat yang terkena dampaknya, dan biasanya terjadi ketika kejadian tersebut melebihi kapasitas masyarakat untuk meresponsnya."
- David Alexander: "Bencana adalah kejadian alam atau manusia yang menghasilkan kerusakan pada lingkungan dan kehidupan manusia, dan dapat merusak infrastruktur dan sistem sosial."

Setiap ahli memiliki pandangan yang berbeda tentang bencana, namun pada dasarnya mereka semua setuju bahwa bencana adalah suatu peristiwa yang merusak dan memiliki dampak besar pada manusia dan lingkungan. Penting bagi masyarakat untuk memahami risiko bencana dan bagaimana mengurangi dampaknya, serta memperkuat kapasitas untuk merespons bencana dengan lebih baik.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Angka 1, Bencana adalah ancaman dan gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat tidak hanya dari faktor manusia, tetapi juga dari faktor alam dan/atau non alam yang menyebabkan faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis dari suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa. Sedangkan menurut Heru Sri Haryanto (2001 : 35), Bencana adalah peristiwa yang merusak pola kehidupan normal, merugikan kehidupan manusia, struktur sosial dan timbulnya kebutuhan masyarakat. Jenis-jenis bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

penanggulangan bencana di klasifikasikan menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Untuk mencegah terjadinya bencana dan meminimalisir kerusakan dampak dari bencana, dibutuhkan sebuah penanggulangan bencana. Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat, dan setelah bencana.

2) Kajian Mitigasi Bencana

Pengertian mitigasi menurut Giri, (2017 : 15) dalam buku tanggap darurat bencana alam. "Mitigasi bencana adalah upaya berkelanjutan untuk mengurangi dampak bencana terhadap manusia dan harta benda". Dari pengertian ini, mitigasi bencana merupakan upaya yang harus disiapkan untuk menghadapi suatu bencana guna untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut.

Menurut Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 33 Tahun 2006 yang berkaitan dengan mitigasi bencana diantaranya:

a. Kebijakan Mitigasi Bencana.

Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi bencana antara lain:

a) Setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing-masing.
b) Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat.
c) Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat di minimalkan.
d) Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta kampanye.

b. Strategi Mitigasi Bencana

Pelaksanakan kebijakan dapat dikembangkan dengan beberapa strategi sebagai berikut :

a) Pemetaan.

Strategi pemetaan sangat berguna bagi pengambilan keputusan terutama dalam antisipasi kejadian bencana alam.

Meskipun demikian, sampai saat ini penggunaan peta ini belum dioptimalkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah :

- Belum seluruh wilayah di Indonesia telah dipetakan.
- Peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik.
- Peta bencana belum terintegrasi.
- Peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda beda sehingga menyulitkan dalam proses integrasinya.

b) Pemantauan

Pengetahuan mengenai tingkat keraanan secara dini dapat dilakukan dengan melalui antisipasi jika sewaktu—waktu terjadi bencana. Sehingga akan mudah melakukan penyelamatan. Pemantauan di daerah vital dan strategic secara jasa dan ekomomi dilakukan di beberapa kawasan rawan bencana.

c) Penyebaran Informasi

Penyebaran informasi dilakukan dengan cara memberikan poster bagi seluruh warga sekolah tentang tata cara mengenali, mencegah dan penanganan bencana. Memberikan informasi ke media cetak dan elektronik tentang kebencanaan adalah salah satu cara penyebaran informasi dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana di suatu kawasan tertentu.

d) Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan warga sekolah dalam menghadapi bencana jika sewaktuwaktu terjadi. Hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh warga sekolah ialah mengenai hidup harmonis dengan alam di daerah bencana, sesuatu yang perlu dihindari dari daerah rawan bencana, dan mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana.

e) Pelatihan/ Pendidikan

Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Tujuan pelatihan lebih ditekankan pada alur petugas lapangan hingga warga sekolah sampai pada tingkat pengungsian dan penyelamatan korban bencana agar dapat membentuk tingginya kesiapan dalam menghadapi suatu bencana.

f) Peringatan Dini

Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinyu di suatu daerah rawan dengan tujuan agar persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dengan tujuan memberikan kesadaran dalam menghindari suatu bencana.

3) Kajian Kesiapsiagaan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2017 menjelaskan tentang pengertian kesiapsiagaan. "Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna". Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa kesiapsiagaan merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi suatu bencana.

Adapun definisi lain dari kesiapsiagaan menurut Marlyono, dkk (2016) berpendapat bahwa "Kesiapsiagaan adalah upaya untuk menghadapi situasi darurat serta mengenali berbagai bantuk sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu". Maksud dari pengertian tersebut yaitu bahwa kesiapsiagaan dilakukan saat menghadapi situasi darurat yang dapat membahayakan bagi setiap orang yang mengalami hal tesebut.

Tujuan dari kesiapsiaagaan menurut Giri, (17 : 2017) adalah sebagai berikut:

a. Mengurangi jumlah kesakitan, resiko kecacatan dan kematian pada saat terjadi bencana.
b. Mencegah atau mengurangi resiko bencana.
c. Mengatasi dampak kesehatan lingkungan akibat bencana.

Prinsip Rencana Siaga untuk Sekolah Menurut Joko, (2011: 172) menjelaskan tentang Prinsip rencana siaga yang harus dilakukan untuk lingkungan sekolah. Prinsip siaga yang harus dilakukan yaitu gedung sekolah perlu diperiksa ketahanannya terhadap gempa bumi. Sebaiknya sekolah dibangun berdasarkan standar bangunan tahan gempa. anak anak sekolah perlu sering dilatih untuk melakukan tindakan penyelamatan diri bila terjadi gempa, misalnya sekurangkurangnya 2 kali dalam setahun.

Maksud dari penjelasan tersebut yaitu prinsip utama kesiagaan dalam menghadapi suatu bencana khusunya bencana gempa bumi yang terjadi di lingkungan sekolah yaitu dengan memeriksa gedung-gedung yang ada di sekolah tersebut, apakah gedung tersebut dibuat berdasarkan standar bangunan yang tahan terhadap gempa bumi

ataukah perlu adanya perbaikan, kemudian dilihat dari tua atau tidaknya gedung itu didirikan karena bangunan yang sudah lama didirikan, biasanya tingkat kekohan nya pun akan semakin rendah sehingga hal ini harus diperhatikan untuk mengurangi resiko bencana. Selain itu, anak-anak sekolah harus sering dilatih untuk melakukan penyelamatan diri agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan saat gempa bumi terjadi. Penting bagi masyarakat untuk memahami risiko bencana dan bagaimana mengurangi dampaknya, serta memperkuat kapasitas untuk merespons bencana dengan lebih baik.

C. Asesmen

1) Identifikasi Masalah

a. Penyebab Masalah

Penyebab permasalahan yaitu belum adanya sosialisai terkait dengan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana pada kelompok usia dini. Kemudian penyebab yang lain adalah kurangnya pengetahuan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana pada kelompok usia dini.

b. Dampak Masalah

Dampak permasalahan yang ada yaitu tidak terbangunnya pengetahuan anak usia dini dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dari bencana. Adapun dampak yang lain adalah meningkatkan risiko terdampak bencana pada anak usia dini.

c. Fokus Masalah

Melihat dari penyebab utama yaitu belum adanya sosialisasi terkait dengan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana pada kelompok usia dini dan dampak utama yaitu tidak terbangunnya pengetahuan anak usia dini dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dari bencana, maka yang menjadi fokus masalah yaitu terkait dengan Perlunya Sosialisasi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di SD Cibiru.

Gambar 2. 6 Analisis Pohon Masalah

Keterangan :

Akar dalam pohon tersebut mengilustrasikan penyebab terjadinya permasalahan yang memunculkan penyebab masalah turunan. Adapun batang pohon mengilustrasikan fokus masalah yang diambil. Kemudian dampak permasalahan di representasikan dalam bentuk daun daunan dalam pohon tersebut.

Berdasarkan analisis pohon masalah tersebut, yang menjadi fokus masalah yaitu terkait dengan Perlunya Optimalisasi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di SD Cibiru. Penyebab utama dalam isu ini yaitu belum adanya sosialisai terkait dengan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana pada kelompok usia dini. Kemudian penyebab yang lain adalah kurangnya pengetahuan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana pada kelompok usia dini. Dampak permasalahan yang ada yaitu tidak terbangunnya pengetahuan anak usia dini dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dari bencana. Adapun dampak yang lain adalah meningkatkan risiko terdampak bencana pada anak usia dini.

2) Identifikasi Kebutuhan

Melihat dari penyebab masalah yang dikaji melalui pohon masalah, dimana penyebab utama masalah ini yaitu belum adanya sosialisai terkait dengan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana pada kelompok usia dini. Kemudian penyebab yang lain adalah kurangnya pengetahuan dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana pada kelompok usia dini. Maka diperlukan adanya penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan sehingga mampu memberikan pengetahuan mengenai mitigasi dan kesiapsiaagaan terhadap bencana pada anak usia dini.

3) Identifikasi Potensi dan Sumber

a. Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu warga lingkungan sekolah.

b. Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu Instansi Sekolah Dasar Cibiru dan BPBD Kabupaten Bandung.

c. Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu BPBD Kabupaten Bandung.

D. Rencana Intervensi

1) Latar Belakang

Desa Soreang merupakan salah satu desa rawan bencana banjir di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Terlebih pada tahun 2022 sempat terendam banjir di beberapa RW yang disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi, adapun penyebab banjir lainnya yaitu sistem atau saluran pembuangan air yang relatif kecil tidak mampu menampung dan mengalirkan air dengan intensitas besar.

Mengingat tingginya risiko banjir tersebut, maka diperlukan suatu upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana banjir terutama pada anak usia dini. Hal tersebut perlu ditanamkan pada usia dini, mengingat pengendalian dan penanggulangan bencana perlu sinergitas seluruh lapisan masyarakat.

Namun dari hasil asesmen belum adanya sosialisai terkait dengan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana pada kelompok usia dini menjadi penyebab utama dari permasalahan yang diangkat. Maka diperlukan sebuah program penyuluhan terkait dengan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana untuk anak usia dini.

2) Tujuan

Adapun tujuan umum dari program ini yaitu :

a. Meningkatkan pengetahuan mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana pada anak usia dini.
b. Memberikan wawasan terkait dengan peran anak usia dini dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Adapun tujuan khusus dari program ini yaitu :

a. Agar anak usia ini memiliki pengetahuan dasar mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan sehingga mampu mengurangi dampak, menyiapkan diri, dan menyelamatkan diri dari risiko terjadinya bencana.
b. Membangun sikap dan kesadaran untuk selalu sadar bencana, sehingga anak mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat evakuasi terjadi.

3) Bentuk Kegiatan dan Program

Nama program ini yaitu "Sosialisasi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Usia Dini". Kegiatan yang dilakukan dalam program ini yaitu dengan pemberian edukasi kepada anak usia dini di SD Cibiru Desa Soreang. Kegiatan direncanakan akan dilaksanakan di Lapangan SD Cibiru Desa Soreang yang diikuti oleh seluruh siswa SD Cibiru.

Tabel 2. 27 Bentuk dan Kegiatan Program

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Narasumber
1.	Penyuluhan mengenai konsep Bencana	Mengetahui dan memahami konsep dari Bencana	BPBD Kabupaten Bandung
2.	Penyuluhan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Mengetahui langkah sederhana Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	
3.	Tanya Jawab dan Pemberian Hadiah	Mampu meningkatkan kapasitas kelompok dengan FGD bersama dengan Kelompok BKL yang aktif	

4) Sistem Partisipan

Sistem Prtisipan yang terlibat dalam program ini yaitu :

a. *Initiator System*

Initiator system dalam program ini adalah praktikan sebagai pekerja sosial yang menyadari adanya masalah dan merasa perlu sebuah program yang dapat memberikan edukasi kepada anak usia dini mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

b. *Change Agent*

Change agent dalam program ini yaitu pekerja sosial dan BPBD Kabupaten Bandung.

c. *Client System*

Client system yang menjadi sasaran utama dalam program ini yaitu siswa SD Cibiru Desa Soreang.

d. *Support System*

Sistem pendukung upaya perubahan ini adalah Pemerintah Desa Soreang, SD Cibiru yang akan memebrikan dukungan kegiatan dengan memberikan sumbangsih berupa moril maupun materiil.

e. *Controlling System*

Controllig system dalam kegiatan ini yaitu Kepala Desa Soreang yang memiliki kekuasaan dan otoritas untuk menyetujui dan memerintahkan pelaksanaan atas program dan rencana perubahan yang diusulkan tersebut.

f. *Implementing System*

Dalam hal ini *Implementing system* yaitu anak usia dini atau siswa SD Cibiru yang akan mengimplementasikan edukasi dari BPBD.

g. *Target System*

Sistem target dalam program ini yaitu Siswa SD Cibiru. Dan selanjutnya yang perlu diberikan perubahan adalah pemahaman Siswa SD Cibiru yang selanjutnya yang perlu dirubah yaitu pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran bencana.

h. *Action System*

Action system dalam program ini yaitu pekerja sosial selaku praktikan dan siswa SD Cibiru kelompok usia dini yang berupaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran terhadap bencana.

5) Metode dan Teknik

Dalam pelaksanaan program "Sosialisasi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Usia Dini", metode yang akan digunakan adalah *Community Organization and Community Development* Brager dan Specht mengatakan bahwa "COCD merupakan suatu metode intervensi, dimana individu, kelompok dan organisasi

terlibat di dalam aksi yang terencana untuk mempengaruhi keadaan permasalahan sosial."

Teknik yang digunakan yaitu :

a. Sosialisasi

   Yaitu dengan memberikan informasi dan edukasi terkait dengan dasar-dasar mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Diharapkan teknik ini mampu memberikan dampak terhadap kemampuan, pengetahuan, dan kesadaran terhadap bencana.

b. Kampanye

   Yaitu dengan memberikan pamflet-pamflet sederhana seperti tanda-tanda terjadinya bencana, dan kiat-kiat kesiapsiagaan bencana. Diharapkan hal ini meningkatkan dan menguatkan informasi dan edukasi yang telah diberikan.

6) Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

Untuk memperkirakan jumlah anggaran yang nantinya dibutuhkan, maka diperlukan suatu rencana anggaran biaya yang nantinya akan digunakan dala pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2. 28 Rencana Anggaran Biaya

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Administrasi				
	Proposal Kegiatan	30	Lembar	500	15.000
	Persuratan	5	Lembar	500	2.500
2.	Logistik				
	Banner 3x1	1	Buah	55.000	55.000
	ATK	1	Pack	35.000	35.000
	Pamflet	10	Buah	2.000	20.000
3.	Honorarium Narasumber Kegiatan				
	BPBD Kab. Bandung	1	Orang	900.000	900.000
4.	Konsumsi				
	Snack Narasumber	1	Orang	10.000	10.000
	Snack Undangan	5	Orang	10.000	50.000
	Makan Siang Narasumber	1	Orang	15.000	15.000
Jumlah					1.102.000

Adapun alat-alat yang dibutuhkan dalam program ini yaitu :

Tabel 2. 29 Alat Kebutuhan Program

No	Alat	Jumlah	Satuan
1.	Sound System	1	Set
2.	LCD Proyektor	1	Set
3.	Laptop	1	Buah
4.	Kabel Terminal	1	Buah
5.	ATK	1	Pack

7) Uji Kelayakan

Untuk menganalisis kelayakan program, maka diperlukan analisis SWOT sehingga dapat dijadikan tolak ukur kelayakan program terkait dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman dalam program ”Peka Kelompok Bina Keluarga Lansia”.

Tabel 2. 30 Analisis SWOT

	Strength	***Weakness***
Internal / Eksternal	• Desa Soreang termasuk daerah rawan bencana • Kawasan sekolah sudah memiliki peta jalur evakuasi • Dukungan dari Pemerintah Desa Soreang	• Kawasan SD Cibiru memiliki peta jalur evakuasi namun belum ada sosialisasi terkait fungsi kepada siswa
Opportunity	**Strategi SO**	**Strategi WO**
• Adanya pihak yang bisa memberikan penyuluhan terkait dengan konsep bencana, mitigasi, dan kesiapsiagaan • Pihak sekolah yang terbuka dan menyadari	• Melakukan kolaborasi serta kerjasama dengan pihak sekolah	• Memberikan edukasi dan informasi kepada siswa terkait dengan konsep bencana, mitigasi, dan kesiapsiagaan

pentingnya edukasi kepada siswa terkait kebencanaan		
Threats	**Strategi ST**	**Strategi WT**
• Perlunya penguatan tambahan selain dengan sosialisasi dan edukasi, mengingat anak usia dini relatif sulit menghafal	• Memberikan pamflet dan mading bergambar sederhana sebagai komponen pendukung sosialisasi	• Menjelaskan fungsi dan mengoptimalkan beberapa komponen yang sudah ada sebagai contoh dalam pengaplikasian

Program ini layak dilaksanakan karena terdapat strategi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah dan mengatasi hambatan. Dalam tabel *Strenght* (S) lebih besar daripada *Weakness* (W) dan *Opportunity* (O) lebih besar daripada *Threats* (T).

8) Jadwal dan Langkah-langkah

Agar kegiatan berjalan dengan sistemati dan teratur, maka diperlukan penyusunan jadwal dan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut.

Tabel 2. 31 Jadwal dan Langkah Kegiatan

No	**Langkah Kegiatan**	**Maret**			
		Minggu			
		I	**II**	**III**	**IV**
1.	Persiapan				
	Membentuk kepanitiaan kecil	■			
	Melakukan rapat konsep kegiatan	■			
	Menyusun proposal kegiatan dan persuratan	■	■		
	Mengurus perizinan dan menjalin kerjasama dengan narasumber		■		
	Menyiapkan alat dan perlengkapan		■		
	Penyebarluasan surat undangan		■		
2.	Pelaksanaan				
	Penyuluhan mengenai konsep Bencana			■	
	Penyuluhan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana			■	
	Tanya Jawab dan Pemberian Hadiah			■	

3.	Pengakhiran				
	Evaluasi kegiatan				
	Penyusunan laporan pertanggungjawaban				
	Pembubaran panitia kecil				

Pelaksanaan kegiatan terbagi menjadi tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan program, dan pengakhiran dengan rincian sebagai berikut :

a. Persiapan

Dalam proses periapan terdiri dari pembentukan panitia kecil sebagai penyelenggara program, adapun pekerja sosial sebagai koordinator dan anggotanya adalah pihak sekolah. Kemudian melakukan rapat, menyusun proposal, perizinan, penyebarluasan surat, dan menyiapkan perlengkapan.

b. Pelaksanaan

Kegiatan dalam program ini rencananya akan dilaksanakan awal bulan yang bertempat di Lapangan SD Cibiru Desa Soreang.

Tabel 2. 32 Rundown Kegiatan

No	Waktu	Durasi	Acara	Pengisi Acara
1.	08.00-08.05	5’	Pembukaan Acara	MC
2.	08.05-08.15	10’	Sambutan-sambutan	Kepala Sekolah atau yang mewakili
3.	08.15-08.35	20’	Penyuluhan mengenai konsep Bencana	BPBD Kabupaten Bandung
4.	08.35-08.55	20’	Penyuluhan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	
5.	08.55-09.15	20’	Tanya Jawab dan Pemberian Hadiah	
6.	09.15-09.20	5’	Penutupan	Pekerja sosial dan panitia

c. Pengakhiran
    a) Monitoring dan Evaluasi
       Dilaksanakan melalui rapat untuk mengetahui apakah program terlaksana sesuai dengan tujuan atau tidak.
    b) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban
       Setelah rangkaikan program, maka perlu dibuat laporan pertanggungjawaban program sebagai syarat tertib administrasi dan pertanggungjawaban kepada pihak sekolah dan desa.
    c) Pembubaran Panitia
       Dengan berakhirnya tahapan pengakhiran maka panitia akan dibubarkan.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

Praktikum laboratorium merupakan kegiatan penting untuk membentuk penguatan kompetensi mahasiswa program studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial bagi guna mencapai lima profil lulusan. Praktikan memilih lokasi praktikum di Desa Soreang, dengan simpulan hasil praktikum sebagai berikut :

A. Analis Jaminan Sosial

Pada Profil Analis Jaminan Sosial, praktikan mengambil isu masalah Rendahnya kepesertaan pekerja sektor informal petani pada BPJS Ketenagakerjaan, yang dalam realitanya masih banyak pekerja sektor informal yang belum menjadi target dari BPJS Ketenagakerjaan. Program rencana intervensi yang direkomendasikan praktikan untuk menangani masalah tersebut adalah Penyuluhan dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal Petani dengan tujuan Memberikan pemahaman informasi dan pemahaman kepada pekerja sektor informal terkhusus petani yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

B. Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

Pada Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, praktikan mengambil isu masalah Kurang Tepatnya pemanfaatan oleh Penerima Manfaat pada Program Indonesia Pintar yang dalam realisasinya masih ada KPM yang mengelola dan memanfaatkan dana bantuan tidak semestinya. Program rencana intervensi yang direkomendasikan praktikan untuk menangani masalah tersebut adalah Penyuluhan dan Pendampingan Pemanfaatan Dana Bantuan PIP dengan tujuan Memberikan pemahaman kepada KPM PIP terkait dengan pengelolaan dana PIP dan pemanfaatan dana dengan semestinya.

C. Analis Pemberdayaan Sosial

Pada Profil Analis Pemberdayaan Sosial, praktikan mengambil isu masalah Kurang Optimalnya Program Bina Keluarga Lansia karena Rendahnya SDM dalam Kepengurusan. Program rencana intervensi yang direkomendasikan praktikan untuk menangani masalah tersebut adalah Peka Kelompok Bina Keluarga Lansia yaitu dengan mengukur kapasitas pengurus kelompok BKL kemudian melaksanakan tindak lanjut dari hasil Penilaian Kapasitas pengurus kelompok BKL. Adapun tujuan dari program ini adalah Optimalnya Program Bina Keluarga Lansia dan Meningkatnya SDM dalam Kepengurusan Kelompok BKL.

D. Analis Penataan Lingkungan Sosial

Pada Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial, praktikan mengambil isu masalah Implementasi yang kurang optimal mengenai Perilaku Hidup Sehat di Lingkungan sekolah. Program rencana intervensi yang direkomendasikan praktikan untuk menangani masalah tersebut adalah Optimalisasi PHBS di Lingkungan Sekolah Dasar Cibiru dengan tujuan Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat yang mampu meningkatkan proses belajar mengajar para siswa.

E. Analis Penanggulangan Bencana

Pada Profil Analis Penanggulangan Bencana, praktikan mengambil isu masalah Perlunya Sosialisasi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di SD Cibiru, yang mana Desa Soreang memiliki potensi terjadinya bencana banjir dan memerlukan sinergi seluruh lapisan masyarakat termasuk anak usia dini. Program rencana intervensi yang direkomendasikan praktikan untuk menangani masalah tersebut adalah Sosialisasi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana Usia Dini. Adapun tujuan dari program adalah Meningkatkan pengetahuan mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana pada anak usia dini.

3.2 Rekomendasi

Mengacu pada hasil kegiatan Praktikum Laboratorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, praktikan mengajukan beberapa rekomendasi berkaitan dengan pelaksanaan Praktikum Laboratorium. Rekomendasi dibuat dalam upaya peningkatan perbaikan pelaksanaan Praktikum Laboratorium yang meliputi rekomendasi bagi Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dan bagi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

A. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
   1. Mempersiapkan sistematika laporan yang matang sebelum praktikum dilaksanakan
   2. Jadwal bimbingan selama praktikum dengan dosen pembimbing dijadwalkan dari awal sehingga tidak mendadak.
   3. Pengadaan ringkasan sekilas materi mata kuliah yang relevan dengan praktikum laboratorium.

B. Politeknik Kesejahteraan Sosial
   1. Meningkatkan fungsi *controlling* kepada mahasiswa praktikum agar lebih terarah dalam pelaksanaan praktikum.
   2. Meningkatkan fungsi perlindungan dan kenyamanan para praktikan selama di lokasi praktikum.

DAFTAR PUSTAKA

Jamsos Indonesia. 2019. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Transformasi Melalui https://www.jamsosindonesia.com/sjsn/transformasi

Mudiyono. 2002. Jaminan Sosial di Indonesia : Relevansi Pendekatan Informal. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 6 (67-78)

Peksos.id. 2021. Metode Utama Pekerjaan Sosial Melalui https://www.peksos.id/metode-utama-dalam-pekerjaansosial/?msclkid=73bb3edacf6611ec9a3bb04b1bdad673.

Pemerintah Indonesia. 2003. UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2004. UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456

Talenta. 2021. Panduan Lengkap BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Melalui https://www.talenta.co/blog/payroll/panduan-lengkap-bpjskesehatandanketenagakerjaan/#:~:text=Sesuai%20dengan%20Undang%20Undang%20No,Jaminan%20Hari%20Tua%20(JHT)

Sambodho, Kriyo. 2017. Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat. Diambil dari https://www.jawapos.com/opini/sudut-pandang /28/09/2017/ manajemen-bencana-berbasis-masyarakat/?msclkid=e2022ebacf5 911ec9b8a333d380928a2.

Admin. (2022) Program Indonesia Pintar Lima Taun Luaskan Akses Pendidikan. Diambil dari https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/program-indonesia-pintar-lima-tahun-luaskan-akses-pendidikan

Direktorat sungai dan pantai Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. Buku Petunjuk Tindakan dan Sistem Mitigasi Banjir Bandang. Semarang: Kementerian Pekerjaan Umum.

Dr. Hj. Sri Hayati, M.Pd. u.d. «Studi Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung .» Artikel Pamekaran 7-8.

Eka Afrina Djamhari, Herni Ramdlaningrum, Aqilatul Layyinah, Adrian Chrisnahutama, Darmawan Prasetya. 2020. Kondisi Kesejahteraan Lansia Dan Perlindungan Sosial Lansia Di Indonesia. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa.

Wati, Astina. 2018. Mitigasi Bencana Banjir Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Babat. Malang: Repository Ub.

Rahayu, Y. (2013, November 22). metode COCD dalam pekerjaan sosial. Retrieved fromyrahayu077.blogspot: http://yrahayu077.blogspot.com/2013/11/metode-cocd-dalam-pekerjaan-sosial.html

Admin. (t.thn.). Definisi Bencana. Diambil kembali dari bnpb.go.id: https://www.bnpb.go.id/definisi-bencana

Admin. (t.thn.). Pengertian Lingkungan Soial, Ciri, Jenis, dan Contohnya. Diambil kembali dari dosenpsiskologi.com: https://dosensosiologi.com/lingkungan-sosial/

Amelia, Ilham, dkk. (2023). Makalah Tanggung Jawab Negara dalam Jaminan Sosial. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Riadi, M. (2017). Tujuan, Prinsip dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat. Diambil dari kajianpustaka.com:https://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-prinsip-dan-tahapan-pemberdayaan-masyarakat.html

Violin, R. (2022). Strategi Badang Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Masalah Kebakaran Lahan di Kota Pekanbaru. Pekanbaru: Universitas Islam Riau

Dewey, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. Macmillan.

Carré, F. (1997). The informal sector in Sub-Saharan Africa: Outcomes of a workshop held at the African Studies Association of the UK annual conference, Manchester, September 1995. Development Policy Review, 15(3), 379-395.

Oliver-Smith, A. (1996). Anthropological research on hazards and disasters. Annual Review of Anthropology, 25(1), 303-328.

McDonough, W., & Braungart, M. (2002). Cradle to cradle: Remaking the way we make things. North Point Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Praktikum

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367, Bandung 40135 Telepon 022-2504838, 2501330
Fax. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, email:humas@poltekesos.ac.id

Nomor : 0141/7.1.8/DL.02.01/01/2023 Bandung, 13 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Melaksanakan kegiatan Praktikum Laboratorium

Yth. Kepala Desa Soreang
Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung
Jawa Barat
Di Soreang

Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dalam proses pembelajarannya, diwajibkan melaksanakan praktik lapangan (praktikum). Kegiatan praktikum laboratorium ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan asesmen dan rencana intervensi pekerjaan sosial di masyarakat sesuai profil lulusan. Pada proses pelaksanaannya mahasiswa akan menerapkan keterampilan dalam melakukan tahapan praktik pekerjaan sosial yang dimulai dengan melakukan pendekatan awal, kemudian asesmen, dan diakhiri dengan penyusunan rencana intervensi,.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merencanakan menempatkan peserta praktikum mahasiswa Poltekesos Bandung di Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat yang rencana pelaksanaan praktikumnya dimulai tanggal 8 Februari s.d. 15 April 2023 (nama mahasiswa praktikan terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR,

Marjuki

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI ;
2. Pertinggal.

Lampiran
Nomor : 0141 /7.1.8/DL.02.01/01/2023
Tanggal : 13 Januari 2023

DAFTAR NAMA MAHASISWA PRAKTIKUM LABORATORIUM DI DESA SOREANG KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT

NO.	NAMA MAHASISWA	NRP	DOSEN PEMBIMBING
1	Suhailla Sekar Ayu	2003019	A. Nelson Aritonang, Ph.D
2	Akhmad Sulthon Iman Naufal	2003025	Rosilawati, S.Sos, MPS.Sp
3	Metiara Cahya Ningrum	2003063	
4	Dinda Ratna Wulan	2003119	
5	Yuni Sarasati	2003023	
6	Siti Amelia	2003115	
7	Erlang Adhi Negara	2003116	
8	Muhammad Brilian Salafuddin	2003114	

DIREKTUR,

Marjuki

Lampiran 2 : Surat Izin Lokakarya

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG
Jl. Ir. H. Juanda No.367 Bandung 40135 Telp (022) 2504838, 2501330 Faks.(022) 2502962 https://www.poltekesos.ac.id/

Nomor : 0994 / 9.7/KS.01/04/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Lokakarya**

Bandung, 10 April 2023

Kepada:
Yth. Kepala Desa Soreang
Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung
di
Tempat

Sehubungan dengan akan berakhirnya Praktikum Laboratorium mahasiswa Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos) Poltekesos Bandung, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara, untuk menghadiri Lokakarya yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	:	**Jumat/ 14 April 2023**
Waktu	:	**Pk. 09.00 – 11.30 WIB**
Acara	:	Lokakarya Praktikum Laboratorium Mahasiswa Poltekesos Bandung
Tempat	:	Kantor Desa Soreang

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan perkenannya disampaikan terima kasih.

DIREKTUR

Marjuki

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Supratman No. 44 Tlp. (022) 7206174-7205759 Fax. (022) 7106286
Website : http://bakesbangpol.jabarprov.go.id Email : bakesbangpol@jabarprov.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 0288/KB.01.04.03/WASDA

Dasar	:	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
Menimbang	:	Surat Dari : Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Nomor : 0332/9.7/KS.01/02/2023 Tanggal : 2 Februari 2023 Perihal : Permohonan Izin Melaksanakan Kegiatan Praktikum Laboratorium
Nama	:	**LINA FAVOURITA SUTIAPUTRI**
Alamat	:	Jl. Riung Karya No. 11 RT 04 RW 09 Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat
Jabatan/Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
No.Tlp	:	'081224487997
Judul Penelitian	:	-
Bidang Penelitian	:	-
Lokasi Penelitian	:	Kabupaten Bandung/Kota Bandung
Lembaga/IInstansi Yang Dituju	:	Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat
Waktu Penelitian	:	Februari – April 2023
Status Penelitian	:	Baru
Anggota Tim Penelitian	:	95 Orang

Diketahui : Di Bandung
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA BARAT,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. KEPALA BIDANG KEWASPADAAN DAERAH

Drs. SAPTA YULIANTO DASUKI, M.A.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)

2D4C917856

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
https://sidebar.jabarprov.go.id/v/2D4C917856

Lampiran 4 : Pedoman Observasi Lapangan

PEDOMAN OBSERVASI
PRAKTIKUM LABORATORIUM

1. **Persiapan:**
   - Mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk observasi.
   - Menentukan tujuan dan fokus pengamatan yang ingin dicapai.
   - Membaca literatur dan informasi terkait dengan masyarakat yang akan diamati.
2. **Identifikasi objek observasi:**
   - Menentukan masyarakat atau kelompok sosial yang akan diobservasi sesuai dengan tujuan observasi.
   - Memastikan sasaran observasi dapat diamati secara langsung dan aman untuk diamati.
3. **Pengamatan:**
   - Mengamati dengan seksama masyarakat atau kelompok sosial yang dipilih dan mencatat informasi yang relevan dengan tujuan observasi.
   - Menggunakan alat bantu seperti kamera atau alat ukur jika diperlukan.
   - Mengamati dengan obyektif dan mencatat informasi secara akurat.
4. **Analisis:**
   - Menganalisis informasi yang telah didapatkan dan mencoba menemukan pola atau hubungan antar variabel yang diamati.
   - Menginterpretasikan hasil observasi dan menemukan implikasi praktis dari hasil tersebut.
   - Tidak ragu untuk kembali mengamati jika terdapat informasi yang tidak cukup jelas atau membingungkan.
5. **Laporan:**
   - Menyusun laporan hasil observasi dengan struktur yang jelas dan rinci.
   - Menyertakan data yang didapatkan dari pengamatan beserta analisis dan interpretasi yang telah dilakukan.
   - Menulis kesimpulan yang didapat dari hasil observasi beserta rekomendasi atau saran untuk pengembangan lebih lanjut.

Pedoman observasi di masyarakat ini menyesuaikan dengan kebutuhan profil yang diamati dan keadaan lapangan. Serta mempeerhatikan etika dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat dan berusaha tidak mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan oleh masyarakat.

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA
PRAKTIKUM LABORATORIUM

1. **Persiapan:**
   - Menentukan tujuan dan fokus wawancara yang ingin digali.
   - Membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan sesuai dengan tujuan dan profil analisis.
   - Melakukan riset sederhana terkait dengan topik yang akan diwawancarai agar dapat mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendalam.
2. **Identifikasi responden:**
   - Menentukan responden yang akan diwawancarai sesuai dengan tujuan wawancara dan profil yang akan dianalisis.
   - Memastikan responden memiliki waktu, pengetahuan, serta pengalaman untuk melakukan wawancara dengan topik yang akan dibahas.
3. **Pengenalan dan perkenalan:**
   - Mengenalkan diri dan tujuan wawancara dengan singkat dan jelas.
   - Menjelaskan bahwa wawancara dilakukan untuk tujuan akademik yang tidak akan merugikan responden atau masyarakat.
4. **Wawancara:**
   - Mengajukan pertanyaan secara sistematis dan jangan terlalu terburu-buru.
   - Tidak menginterrupsi responden ketika sedang menjawab pertanyaan.
   - Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh responden.
   - Memberikan kesempatan bagi responden untuk menyampaikan pendapat atau pengalaman secara lebih rinci.
5. **Analisis:**
   - Menganalisis jawaban dari responden dalam wawancara.
   - Tidak ragu untuk kembali melakukan wawancara jika terdapat informasi yang tidak cukup jelas atau membingungkan.
6. **Laporan:**
   - Membuat cacatan singkat hasil wawancara dengan struktur yang jelas dan rinci.
   - Mengumpulkan data yang didapatkan dari wawancara.
   - Menulis kesimpulan yang didapat dari hasil wawancara beserta rekomendasi atau saran untuk pengembangan lebih lanjut.

Pedoman wawancara ini menyesuaikan dengan kebutuhan profil yang diamati dan keadaan lapangan. Serta mempeerhatikan etika dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat dan berusaha tidak mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan oleh masyarakat.

Lampiran 6 : Dokumentasi Kegiatan

Praktik Pemberdayaan Sosial
& Permasalahannya

Penataan Lingkungan Sosial